

Sahabat Keluarga



STUNTING TURUN

**Raih Peluang Besar
Indonesia Emas 2045**

Program GenRe
Bakal Dipromosikan
di Kancan Internasional

Semangati Tim
Pendamping Keluarga
untuk Turunkan *Stunting*



Apa itu *STUNTING*, Mengapa Terjadi, dan Bagaimana Mencegahnya

Apa itu *stunting*?

Stunting adalah kekurangan gizi pada balita yang berlangsung lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak.

Karena mengalami kekurangan gizi menahun, balita *stunting* tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seumurnya.



Akibat *stunting* pada Balita

- Terganggunya perkembangan otak dan fisik balita. Hal ini akan membuat balita sulit mencapai prestasinya kelak
- Balita akan lebih rentan terhadap penyakit
- Selain itu, kelak saat dewasa akan lebih mudah mengalami penyakit jantung, diabetes dan lainnya.

Penyebab kekurangan gizi

Kekurangan gizi menahun khususnya pada masa 1000 hari pertama kehidupan (HPK), yang dimulai dari masa kehamilan hingga balita berumur 2 tahun. 1000 HPK merupakan periode emas pertumbuhan Balita. Pada periode tersebut 80% otak balita berkembang, masa ini tidak akan terulang kembali.

Secara umum penyebab kekurangan gizi dikarenakan :

- Kekurangan asupan gizi, karena pola asuh yang kurang tepat dalam pemberian makan balita, baik dari jumlah dan jenisnya.
- Paparan kuman/bakteri pada balita.
- Lingkungan yang tidak bersih menyebabkan balita terpapar bakteri.
- Infeksi bakteri ini mengakibatkan asupan gizi untuk pertumbuhan balita terpaksa digunakan tubuh untuk melawan infeksi bakteri.
- Bakteri bersumber dari lingkungan misalnya karena buang air besar sembarangan.

Pencegahan *stunting*

1. Pada Masa Kehamilan

- Pemeriksaan kehamilan (minimal 4 kali) dengan melibatkan suami
- Minum Tablet Tambah Darah 90 tablet untuk cegah kurang darah (anemia)
- Tambah 1 porsi makan (makan lebih)
- Konsumsi protein hewani (ATIKA: Ati, Telur, Ikan)
- Kunjungi Posyandu setiap bulan
- Ikuti 4 kali kelas ibu Hamil selama masa kehamilan

2. Pada bayi 0-6 bulan

- Melahirkan di fasilitas kesehatan
- Bayi segera mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) segera setelah lahir
- Berikan imunisasi sesuai jadwal
- Pantau pertumbuhan bayi ke Posyandu setiap bulannya
- Berikan ASI saja sebanyak mungkin pada bayi

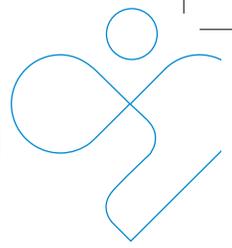
3. Pada Bayi 6 bulan – 2 tahun

- Berikan ASI sebanyak mungkin
- Balita harus makan 3 kali sehari dengan 2 kali selingan/*snack*
- Cuci tangan sebelum memberikan makanan pada balita
- Berikan imunisasi sesuai jadwal
- Pantau pertumbuhan balita di Posyandu setiap bulan

Cuci tangan mencegah *stunting*

Tangan bisa menjadi media penularan kuman ke bayi, maka lakukan cuci tangan di saat penting:

- Sebelum menyiapkan makanan
- Sebelum makan dan memberi makan bayi
- Sebelum memegang bayi
- Sesudah buang air besar/kecil
- Sesudah menceboki bayi



EDITORIAL

Titik Sentral Program BKKBN 1

JENDELA

Stunting Turun
Raih Peluang Besar Indonesia Emas 2045 2

LAPORAN UTAMA

Hadiri Peringatan Harganas Sulawesi Utara
Hasto Wardoyo Ajak
Keluarga Cegah *Stunting* 4

Semangati Tim Pendamping Keluarga
untuk Turunkan *Stunting* 6

Program GenRe Bakal Dipromosikan
di Kancah Internasional 8

Dari Workshop Satgas PPS:
Capaian *Stunting* NTT Tertinggi,
Bali Terendah 11

Maluku Utara Percepat
Penurunan *Stunting* Menuju 14% 12

LAPORAN KHUSUS

Bermula dari Puskesmas,
Deputi BKKBN Ini Pun Purna Tugas 14

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala BKKBN:
Down Grade Diri Bukan untuk
Diremehkan, Tapi Suatu Kehormatan 16

Kerjasama BKKBN dan Yayasan Kinarya Anak
Selamatkan Bumi dan Manusia 18

BKKBN Raih Penghargaan
Transaksi *e-Purchasing*
Klaster Kementerian dan Lembaga 20

STUNTING

Persiapan Tiga Bulan Pranikah untuk Cegah *Stunting*
Kepala BKKBN Apresiasi Dewan Paroki Gereja
Katolik Halim Perdanakusuma 22

Kepala BKKBN Beri Warna Baru Konawe Selatan
Motivasi Akseptor KB dan Kukuhkan BAAS 24

Cegah *Stunting* Melalui Pelayanan KB
BKKBN Sulbar-Sulsel Kolaborasi
di Wilayah Perbatasan 26

Walikota Pangkalpinang Pasang Target,
Prevalensi *Stunting* 10% Tahun Ini 27

Sekolah Jenius Atasi *Stunting*
Modul Kurikulum Berbasis
Gizi dan Kesehatan 28

TNI & STUNTING

Bakti Sosial & Kesehatan Digelar
BKKBN-POLRI-TNI Sinergi
Turunkan *Stunting* 30

SOROT

Tingkatkan Kualitas Rumah Dataku
Perlu Keterlibatan Lintas Sektor 32

POTRET 34

KEPENDUDUKAN

Pembangunan Kependudukan Bergeser,
Fokus Pada Percepatan
Peningkatan Kualitas Penduduk 36

PEMBANGUNAN KELUARGA

64 Persen Anak *Stunting* Tinggal
Dalam Keluarga Dengan Perokok 38

Agar Menjadi Generasi Berkarakter,
Siswa SMA Diskusi Soal Seksualitas 39

SOSOK

Kegalauan Anggota Legislatif Termuda,
25 Titik Sosialisasi *Stunting* Dirambahnya 40

KIPRAH

ALIBATA, Inovasi Unggulan Bener Meriah
dalam Percepatan Penurunan *Stunting* 42

Stunting Terendah di Indonesia
Gubernur Koster dan Ny Putri Koster
Raih Penghargaan MKK 44

Perkawinan Anak Tinggi,
Ancaman Kehamilan Usia
Dini dan Risiko *Stunting* 46

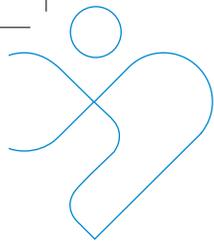
TEKA TEKI SILANG 47

DAERAH

Kerja Kolaboratif OPD
Bupati Pinrang Berharap
Prevalensi *Stunting* 15% di 2023 48

dr HASTO MENJAWAB 50

PERSPEKTIF 51



REDAKSI

Sahabat Keluarga



Media Center BKKBN

mediacenter@bkkbn.go.id
Telp. 0812-3888-8840
Jl. Permata nomor 1
Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur

Redaksi menerima tulisan terkait isu Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga serta *Stunting*.

Kirim ke alamat/kantor redaksi atau email redaksi.

Pelindung

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K)

Pengarah

Deputi Bidang Advokasi, Penggerak dan Informasi
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, M.Pd

Penanggungjawab

Plt. Direktur Komunikasi, Informasi, Edukasi
Dr. Dadi Ahmad Roswandi, M.Si

Redaktur

Ade Anwar
Muktiani Asrie Suryaningrum
Fimela Apriany
Annisa Halimatusyadiah
Bramanda Garibaldi
Ronny A.P. Situmorang

Penyunting

Kristianto
Santjojo Rahardjo
Emah Salomi Suebu
Rika Utari
Duly Apika Sari

Desain Grafis

Antonius Angkawijaya
Subhan

Sekretariat

Teddi Hadian Ruswandi
Nina Tri Rahmiyanti

Pembuat Artikel

Vin Mamarodia
Tri Wulandari Henny Astuti
Fatimah
Fitri Aminatul Azizah
Rizky Fauzia
Iklamin
Melta
Martin
Eka
Feriani Padriah
Dian Windriyanti
Siefa Fauziah
Chathiyana Fafilya
FX Danarto SY
Satya Utama Nugraha
Nur Octavia Dian R
Indra Gumbira Rukmana
Meilinda Renata
Padly Hadis Said

Fotografer

Muhammad Rinaldy
Vivaldi Maulana Zhafran
Samidi



bkkbnofficial



@BKKBNOfficial



@BKKBNOfficial



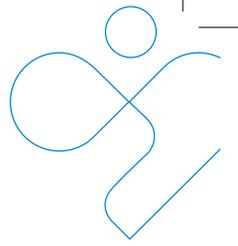
BKKBNOfficial



BKKBNOfficial



<http://www.bkkbn.go.id>



TITIK SENTRAL PROGRAM BKKBN

Ketika Jenderal TNI Andika Perkasa selaku Panglima TNI kala itu menyatakan kesediaannya untuk dikukuhkan oleh BKKBN sebagai Bapak Asuh Anak *Stunting* (BAAS), program Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) seolah mendapat pijakan yang kian kuat.

Betapa tidak, pasukan TNI yang begitu banyak dan tersebar merata di seluruh wilayah tanah air akan memudahkan BKKBN mendengungkan strategisnya program PPS kepada masyarakat secara segera dan serentak hingga di wilayah terluar dan remot area sekali pun.

Dewasa ini PPS memang menjadi program prioritas nasional. Karenanya juga menjadi program terdepan BKKBN. PPS menjadi titik sentral dari tiga program yang juga diemban BKKBN, yakni Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Segala daya upaya pengembangan kegiatan program Bangga Kencana akan selalu diarahkan pada lokus utama program pemerintah, yaitu percepatan penurunan *stunting*.

Sebagai contoh, pelayanan KB kini bukan lagi sekadar pengendalian pertumbuhan penduduk semata. Tetapi di dalamnya ada program pengaturan jarak kelahiran. Program ini dinilai BKKBN strategis karena akan berkolerasi langsung dengan upaya bangsa ini menggapai *zero stunting* atau setidaknya target 14 persen *stunting* pada 2024.

Pola asuh anak dalam kerangka program Pemberdayaan Keluarga juga menjadi salah satu faktor dominan yang bisa mempengaruhi naik-

turunnya kasus *stunting* di Indonesia. Secara nasional, 70 persen *stunting* – atau di beberapa daerah bahkan angkanya ada yang mencapai 95 persen – berasal dari keluarga cukup secara ekonomi.

Terkait tata kelola lingkungan, juga menjadi pemicu utama muncul tidaknya *stunting* pada anak. Lingkungan yang kotor, jambanisasi yang tidak memadai, rumah kurang penerangan karena ventilasi udara atau jendela yang kurang, juga menjadi salah satu penyebab mengapa kasus *stunting* meninggi di era sebelum 2021.

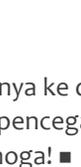
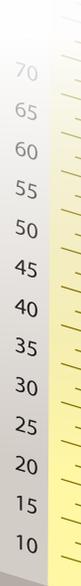
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 telah mengubah semua paradigma tentang penanganan

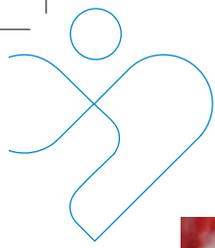
stunting selama ini. Sebagai Ketua Pelaksana PPS tingkat nasional, strategi yang dikembangkan Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) bersama jajarannya adalah menggaet sebanyak mungkin mitra kerja. Di antaranya TNI, pengusaha, akademisi, para pejabat, hingga masyarakat luas.

Kini, gegap gempita upaya menyelamatkan anak bangsa dari keterpurukan akibat *stunting* masif dilakukan banyak pihak. Permintaan audiensi dengan Kepala BKKBN semakin banyak berdatangan dari berbagai kalangan. Belum sampai di ujung karya, namun prevalensi *stunting* telah turun menjadi 21,6 persen di 2022 dari 27 persen di 2019.

Angka-angka di atas menjadi sinyal positif bahwa bangsa ini peduli terhadap kemajuan

bangsanya ke depan. Sukses KB akan juga diikuti sukses pencegahan *stunting* di tanah air kita tercinta ini. Semoga! ■





Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.

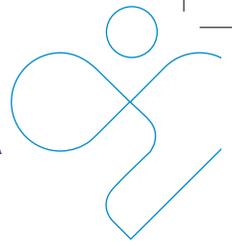
STUNTING TURUN **Raih Peluang Besar Indonesia Emas 2045**

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

JAKARTA, BKKBN – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar meraih Indonesia Emas 2045 dengan meraih posisi menjadi negara lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Pengawasan itu disampaikan Presiden Joko Widodo

dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, yang diselenggarakan secara daring dan luring dari Gedung DPR-RI Senayan Jakarta, Rabu (16/8/2023).



Presiden mengatakan, tidak hanya peluang saja untuk meraih Indonesia Emas 2035, tapi strategi untuk meraihnya sudah ada. Sudah dirumuskan. “Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju, atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah, bahkan yang membuat kita melangkah mundur,” ujar Presiden.

Presiden yang mengenakan baju khas adat Tanimbar, Maluku, dalam Sidang Tahunan itu mengemukakan tentang bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an. “Ini adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita,” urai Presiden Joko Widodo.



Kita telah berhasil menurunkan angka *stunting* menjadi 21,6% di 2022 dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,91 di 2022. Kita juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,59 di 2022

Strategi untuk memanfaatkan peluang itu, menurut Presiden, dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia.

“Kita telah berhasil menurunkan angka *stunting* menjadi 21,6% di 2022 dan menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,91 di 2022. Kita juga telah meningkatkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,59 di 2022,” ungkap Presiden.

Capaian lainnya, lanjut Presiden, “Kita telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial, dengan total Rp3.212 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2023.”

Capaian itu termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

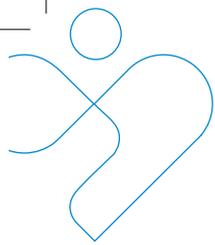
Presiden juga mengemukakan, *international trust* yang dimiliki Indonesia saat ini dibangun bukan sekadar melalui ‘*gimmick*’ dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

“Dengan *international trust* yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam bernegosiasi,” tutur Presiden.

Editor: Kristianto



Pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI.



Hadiri Peringatan Harganas Sulawesi Utara

Hasto Wardoyo Ajak Keluarga Cegah *Stunting*

■ Penulis: Vin Mamarodia

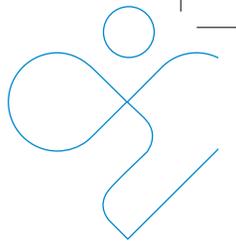
MANADO – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K) menghadiri peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kabupaten Minahasa Selatan, Minggu (27/08/2023).

Hasto Wardoyo mengatakan BKKBN menggalakkan Program Pembangunan Keluarga untuk mencegah *stunting*. “Mari jadikan keluarga kita menjadi keluarga tenteram, mandiri dan bahagia. Mari bahu membahu untuk membangun keluarga. Jagalah kebersihan lingkungan keluarga dengan menata sanitasi,” ujar Hasto Wardoyo pada puncak peringatan Harganas tingkat Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Terbuka Publik (RTP) Amurang, Minahasa Selatan.

Hadir pada kegiatan ini di antaranya Deputi KBKR BKKBN RI dr. Eni Agustina, M.P.H, Kepala Dinas Dukcapil dan

BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) memberikan sejumlah penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Provinsi Sulawesi Utara yang digelar di Kabupaten Minahasa Selatan.





KB Provinsi Sulawesi Utara Christodharma Sondakh, S.H, Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar, S.H dan jajaran, Pemkab/Pemkot se-Sulut, Kepala BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Erg dan jajaran serta para undangan lainnya.

Selanjutnya Hasto Wardoyo menyebutkan yang sangat penting dalam pencegahan *stunting* di keluarga adalah dengan menjaga jarak waktu kelahiran.

Stunting itu pendek. Tapi pendek belum tentu *stunting*. Ciri anak *stunting* itu sakit-sakitan dan pertumbuhan lambat,” jelas Hasto Wardoyo.

Oleh karena itu, Kepala BKKBN RI menyarankan untuk mendapatkan angka anak *stunting* yang

akurat, mengumpulkan para bidan dan melaksanakan pengukuran dan penimbangan dengan baik semua anak balita.

Selain itu diingatkan agar anggaran diserap dengan baik, untuk membelikan makanan tambahan bagi anak dan keluarga beresiko dan anak *stunting*. “Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Frangky Donny Wongkar dan jajaran yang telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023,” kata Hasto.

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Ir. Diano Tino Tandaju, M.Eng menjelaskan, dalam rangka pelaksanaan Harganas ke-30 tahun 2023 antara lain dilaksanakan Gelar Dagang Produk (yang tergabung dalam kelompok UPPKA), se-Provinsi Sulut pelayanan kesehatan dan pelayanan KB, gelar Dapur Sehat Atasi *Stunting* (Dahsat) serta pentas seni dan budaya dari 15 Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara.

Harapan dengan kegiatan Harganas ke-30 yang bertepatan Keluarga Bebas *Stunting* untuk Sulut Laju, sebut Tandaju, dapat memberikan daya ungkit dalam pencapaian program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Kepala Dinas Dukcapil dan KB Sulut Christodharma Sondakh dalam sambutannya mewakili Gubernur Sulawesi Utara menyebutkan, momen Harganas ke-30 merupakan momentum bagaimana memahami pentingnya keluarga dalam membangun fondasi bangsa.

“Mari kita tingkatkan waktu yang berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga,” kata Gubernur Sulut dalam sambutannya itu.

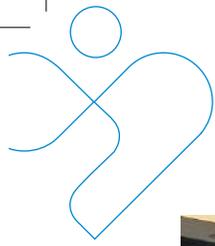
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar memberi apresiasi yang tinggi kepada Kepala BKKBN, Gubernur Sulut yang telah mempercayai Kabupaten Minsel menjadi tuan rumah penyelenggaraan peringatan Harganas ke-30 tingkat Provinsi Sulut.

Bupati menyapa seluruh hadirin dengan salam bahagia dan menyampaikan selamat mengikuti peringatan Harganas Tahun 2023 tingkat Provinsi Sulut.



Selain pemberian sejumlah penghargaan, pada peringatan Harganas) tingkat Provinsi Sulawesi Utara dibagikan bingkisan pada masyarakat.

Editor: Kristianto



Peserta Kelas TPK Hebat Seri III Tahun 2023 bertema Mekanisme Kesehatan mekanisme rujukan dan optimalisasi ibu pasca persalinan dan ibu menyusui yang diselenggarakan secara virtual.

Semangati Tim Pendamping Keluarga untuk Turunkan *Stunting*

■ Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti

JAKARTA, BKKBN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG. (K) memberi semangat kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mewujudkan percepatan penurunan *stunting*.

Semangat tersebut disampaikan Hasto Wardoyo dalam Kelas TPK Hebat Seri III Tahun 2023 bertema “Mekanisme Kesehatan mekanisme rujukan dan optimalisasi ibu pasca persalinan dan ibu menyusui” yang diselenggarakan secara *hybrid* di Jakarta secara virtual dan *live streaming* melalui YouTube Channel @BKKBN Official pada Rabu (16/08/2023).

“Semua Bapak dan Ibu TPK bisa belajar dan berdiskusi dengan para pakar, para pemangku kebijakan terkait dengan masalah bagaimana pendampingan keluarga, tata laksana yang benar seperti apa, masalah-masalah kesehatan gizi termasuk rujukannya bagaimana,” kata Hasto.

“Kemudian bagaimana kita bisa memberikan KIE atau informasi dan edukasi yang kita harus tahu bagaimana mekanisme kerja TPK dan bagaimana juga mengenal bantuan-bantuan sosial yang ada di tengah masyarakat, agar kita bisa memberikan informasi kepada mereka. Satu

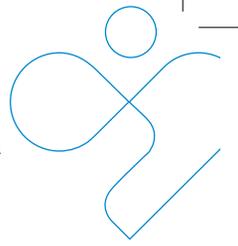
hal yang penting juga jangan ditinggalkan adalah mengisi Elektronik Siap Nikah & Hamil (Elsimil), siapa yang mau menikah agar didampingi untuk mengisi,” ujar Hasto.

Sementara itu, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan pemberdayaan Keluarga (KSPK) BKKBN Nopian Andusti, SE, MT menyampaikan sambutannya saat membuka acara. Kelas TPK Hebat ini sangat penting dalam mendukung keluarga-keluarga di Indonesia mencegah *stunting* karena fase menyusui termasuk dalam fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) bagi seorang anak.

Nopian mengatakan kesehatan ibu pasca persalinan dan ibu menyusui merupakan prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melakukan perawatan pasca persalinan dengan baik dan penting bagi para ibu. Sehingga ibu bisa menjalani aktivitas dengan nyaman termasuk menyusui bayi.

Upaya memberikan edukasi pendampingan dan psikolog sosial kepada ibu pasca persalinan menurut Nopian, sangatlah penting.

“Optimalkan pemanfaatan buku KIA yang didampingi kader untuk memantau Kesehatan ibu dan anak serta memperoleh berbagai informasi tentang pelayanan buku KIA sebagai standar pelayanan penyuluhan dan konsultasi



...kita harus tahu bagaimana mekanisme kerja TPK dan bagaimana juga mengenal bantuan-bantuan sosial yang ada di tengah masyarakat, agar kita bisa memberikan informasi kepada mereka. Satu hal yang penting juga jangan ditinggalkan adalah mengisi Elektronik Siap Nikah & Hamil (Elsimil), siapa yang mau menikah agar didampingi untuk mengisi

kesehatan, sehingga pelayanan ibu dan anak dapat diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan,” kata Nopian.

Nopian juga menyampaikan dan mengapresiasi dedikasi serta kerja keras para TPK dalam memberikan pendampingan dan informasi pada ibu-ibu. Kemudian mekanisme rujukan juga merupakan poin penting dalam upaya memastikan kesehatan ibu dan bayi, kerjasama yang baik antara berbagai pihak mulai dari TPK, puskesmas, rumah sakit hingga spesialis anak.

“Hal ini, diperlukan untuk memastikan bahwa ibu dan bayi mendapatkan perawatan yang tepat dan tepat waktu. Peran rekan-rekan TPK dalam membantu keluarga memahami rujukan serta pendampingan mereka, proses ini sangatlah berarti dan strategis,” ujar Nopian.

“Selain itu optimalisasi gizi ibu pasca persalinan dan ibu menyusui merupakan faktor penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang

sehat bagi bayi. Edukasi tentang gizi yang seimbang dan dukungan dalam pemberian makanan yang tepat dapat membantu ibu memberikan ASI yang berkualitas serta memenuhi kebutuhan gizi,” jelas Nopian.

Pada kesempatan yang sama hadir juga Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak (Ditbalnak) BKKBN, dr. Irma Ardiana, MAPS, menyampaikan dalam laporannya, Berdasarkan pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2022, cakupan pendampingan keluarga berisiko *stunting* sudah mencapai target sebesar 42.7% (5.7 juta dari 13,4 juta keluarga berisiko) dari target 30% tahun 2022.

Namun demikian masih terdapat dua indikator pendampingan yang perlu menjadi perhatian, antara lain cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan Kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan dan pendampingan ibu hamil berupa promosi dan konseling kesehatan selama kehamilan yang masih perlu ditingkatkan cakupannya.

Tim Pendamping Keluarga (TPK) merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan, Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin/ Calon Pasangan Usia Subur, keluarga yang memiliki ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan anak usia dibawah 5 tahun (balita) yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko *stunting*.

Pada awal 2023, BKKBN secara marathon telah melakukan orientasi kepada TPK sebanyak 517.307 orang dari target 600.000 atau 86.2%, dengan materi orientasi meliputi 1000 HPK, Mekanisme kerja TPK, Penggunaan Elsimil, Peran Kampung KB dan Komunikasi Antar Pribadi (KAP).

Editor: Kristianto



Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak (Ditbalnak) BKKBN, dr. Irma Ardiana, MAPS saat menyampaikan dalam laporannya.

Program GenRe Bakal Dipromosikan di Kancah Internasional

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

JAKARTA, BKKBN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bertekad mempromosikan program Generasi Berencana (GenRe) ke kancah internasional. Program ini dinilai menjadi salah satu sarana yang tepat dalam upaya pencegahan atau percepatan penurunan *stunting* di dunia.



Prof. drh. M. Rizal M Damanik, MRep.Sc, PhD,

“Persoalan remaja menjadi penting dan program GenRe yang diinisiasi dan dikembangkan BKKBN bisa go internasional di tengah arus dunia yang serba teknologi. Program ini bisa untuk pencegahan *stunting*, mengatur jarak kelahiran anak. Sehingga akan lahir generasi sehat dan berkualitas.”

Hal itu dikatakan Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN, Prof. drh. M. Rizal M Damanik, MRep.Sc, PhD, Senin (14/8/2023), secara daring.

Selama tiga dari 8 - 10 Agustus 2023, Rizal Damanik didampingi Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM, MPS, MA sebagai Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan Keluarga Berencana (Pulin) BKKBN berada di Daka, Banglades, menghadiri Pertemuan Tahunan *Partners In Population and Development* (PPD) ke-38.

“Ini yang akan saya usung (program GenRe). Kita ingin menjadi trendsetter. Sehingga di seluruh dunia tidak lagi lahir bayi *stunting*,” ujar Rizal Damanik.

Rizal Damanik juga mengemukakan rencananya bertolak ke Kairo, Mesir, pada Oktober 2023 atas undangan pemerintah setempat untuk memaparkan *best practice* (praktik baik) tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Ketertarikan Mesir terhadap program Bangga Kencana dilatarbelakangi diterimanya penghargaan *United Nation Population Award* (UNPA) oleh pemerintah Indonesia.

Dalam rangka persiapan peringatan ICPD +30 tahun 2024, Rizal Damanik mengatakan bahwa pertemuan tersebut di antaranya akan dihadiri sejumlah negara Afrika. Saat ini Republik Seychelles menjadi hub bagi kerjasama negara-negara Afrika dengan program yang diampu BKKBN.

Diinformasikan pula bahwa delegasi Kenya dijadualkan akan belajar tentang KB Pasca Persalinan di Indonesia pada 17 - 23 September, selama lima hari. Menurut



Pertemuan Tahunan *Partners In Population and Development* (PPD) ke-38 di Daka, Banglades.

rencana, delegasi Kenya yang terdiri atas 12 dokter dan bidan akan melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Madiun (Jawa Timur).

“Bangladesh juga ingin belajar ke Indonesia (tahun ini), tapi terkendali pendanaan,” ujar Rizal Damanik. Pemerintah Bangladesh termasuk yang paling sering bekerjasama mengirim peserta pelatihan internasional ke BKKBN.

“Hasilnya, capaian program KB di Bangladesh relatif semakin baik, merupakan dampak dari berbagai pelatihan internasional dengan BKKBN Indonesia,” ujar Rizal Damanik.

Pada Oktober 2023, delegasi India juga akan



Prof. drh. M. Rizal M Damanik, MRep.Sc, PhD, berpidato saat Pertemuan Tahunan PPD ke-38.

berkunjung ke Indonesia (Jawa Barat). Mereka akan belajar tentang *Contraceptive Supply Chain Management*. Filipina juga dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada November 2023, bertujuan mempelajari tatakelola Kampung KB, *stunting* dan *food bank*, dengan lokasi kunjungan lapangan di Yogyakarta.

Hampir seluruh dari 26 negara anggota PPD, kata Rizal Damanik, sudah pernah belajar program Bangsa Kencana, termasuk kesehatan reproduksi (Kespro), di Indonesia, kecuali Meksiko. Kemitraan yang dikembangkan dengan negara-negara tersebut berpola G to G.

Rizal Damanik mengatakan, sebagai media pembelajaran ke dunia internasional, BKKBN melalui Pulin juga mengembangkan program *Ambassador Talk* dan *Ambassador Goes to Kampung KB*.

Bukan hanya berdampak positif bagi BKKBN, namun program-program yang dikembangkan itu juga memberikan banyak manfaat, di antaranya promosi bagi destinasi wisata tempat para Duta Besar melakukan kunjungan lapangan.

Lebih jauh Rizal Damanik mengemukakan tentang penyelenggaraan PPD yang beranggotakan 26 negara, dengan delapan negara sebagai *Executif Committee* (Banglades, Afrika Selatan, Cina, Indonesia, Benin, Kenya, Tunisia, Meksiko).

Dalam pertemuan itu, delegasi Indonesia mengusulkan agar uang keanggotaan sebesar US\$20.000/negara (atau sekitar total US\$ 520 ribu/tahun) dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga kegiatan PPD lebih dinamis.

Dana anggota yang tersimpan itu, sesuai usulan



Para delegasi dari berbagai negara yang mengikuti Pertemuan Tahunan *Partners In Population and Development* (PPD) ke-38 di Daka, Banglades.

Indonesia, dialokasikan untuk anggaran sekretariat dan *executive committee*. Sisanya secara bergiliran selama tiga tahun ke negara anggota PPD. “Dibagikan sebagai dana stimulan. Dibagi secara bertahap ke negara anggota dalam periode waktu tiga tahun,” ujar Rizal Damanik.

Usulan Indonesia mendapat tanggapan positif negara-negara Afrika. Proporsi idealnya, menurut Rizal Damanik, 65-70 persen untuk kegiatan yang dikelola anggota. Sisanya 30-35 persen berjalan untuk sekretariat dan direktur eksekutif yang saat ini sedang dalam pemilihan.

“Kalau nantinya konsep Indonesia bisa diadop, maka kunjungan antar negara bisa jalan. Sejauh ini, dari 26 negara anggota kegiatannya hanya rutinitas, tidak ada terobosan,” jelas Rizal Damanik.

PPD akan melakukan kembali pertemuan di tingkat *executive committee* pada Oktober 2023 di Zimbabwe. Tujuannya, mengonkritkan hasil pembahasan pada pertemuan Daka, dan sekaligus membahas kegiatan yang belum terlaksana akibat pandemi Covid-19.

PPD Ke-38

Pembukaan Pertemuan Tahunan *Partners In Population and Development* (PPD) ke-38 berlangsung di hotel Pan Pacific Daka, Banglades, pada 8 Agustus 2023, mengangkat tema sentral bagaimana PPD menyikapi penduduk ke delapan miliar dunia, bagaimana pula memenuhi kesejahteraan mereka.

Dihadiri anggota *executive Committee* PPD, termasuk Indonesia diwakili Deputi Lalitbang BKKBN RI, pertemuan ini membahas isu global kependudukan dan pembangunan serta organisasi internal PPD.

Indonesia memainkan peran penting sebagai bendahara PPD dan mendapatkan hak vote untuk pengambilan keputusan organisasi internasional PPD.

Pada hari kedua, pertemuan berupa rapat tahunan PPD, dengan agenda treasurer meeting di mana BKKBN sebagai bendahara PPD berkoordinasi dengan para pengelola keuangan PPD perihal kebijakan penganggaran institusi PPD. Dilanjutkan audiensi dengan Kedubes RI di Daka.

Pada hari ketiga pertemuan diisi dengan pembahasan atas laporan sekretaris, bendahara, Direktur Eksekutif PPD, menyepakati AWP 2023, respons hasil audit, dan rencana kolaborasi Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) antar negara.

Editor: Annisa



M. Rizal M Damanik menerima cinderamata.

Dari *Workshop* Satgas PPS:

Capaian *Stunting* NTT Tertinggi, Bali Terendah



Sekretaris Utama BKKBN
Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si



Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022

■ Penulis: Fatimah

BEKASI, BKKBN - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa tahun 2022 Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan prevalensi *stunting* tertinggi secara nasional, berada di kisaran 35,3%, dan terendah 8% berada di Provinsi Bali.

Disamping itu terdapat enam provinsi yang mengalami kenaikan, yaitu Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sumatera Barat dan Kalimantan Timur.

Data ini terungkap pada acara *Workshop* Satgas Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS) bagi *Technical Assistant* Kabupaten/Kota, di Hotel Santika Premiere Harapan Indah, Bekasi, Kamis (24/08).

Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia, secara nasional prevalensi *stunting* tahun 2021 tercatat 24,4% dan tahun 2022 menurun menjadi 21,6%.

Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, Sekretaris Utama BKKBN yang membuka *workshop* tersebut berharap kegiatan ini dapat mempercepat pelaksanaan program percepatan penurunan *stunting*, terutama di 12 provinsi yang bisa mendongkrak turunnya angka *stunting* nasional.

“Dengan adanya *workshop* ini, satgas *stunting* di kabupaten/kota juga bisa lebih *update* isu terkini. Termasuk merespon program terkini seperti Survei

Kesehatan Indonesia,” ujar Tavip.

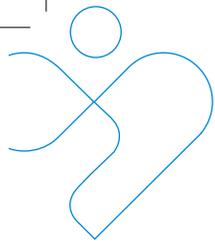
Dia juga mengatakan, “Bersama para fasilitator, peserta bisa lebih mendiskusikan bersama aksi nyata yang bisa dilakukan dalam rangka menyikapi kondisi di daerahnya masing-masing dan menyiapkan strategi-strategi dalam rangka melaksanakan tujuh *quick win*.”

Workshop Satgas *Stunting* ini diikuti 95 peserta *Technical Assistant* Kabupaten/Kota dari empat provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara dan NTT.

Adapun fasilitator dalam kegiatan ini adalah Drs. Ipin ZA Husni selaku *Program Manager* Sekretariat Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat; DR. Dr. Lucy Widasari, M.Si selaku *Program Officer* Bidang Program dan Kegiatan; Rico Kurniawan dari *Program Officer* Bidang Data dan *Monitoring* Evaluasi; Febriansyah Soebagio, S.IP, MCPD dari *Program Officer* Bidang Umum Sekretariat *Stunting*.

“Kami menaruh harapan banyak kepada *Technical Assistant* yang merupakan mitra BKKBN untuk dapat membantu kami dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* dalam upaya berjalannya konvergensi, pendampingan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan mewujudkan Satu Data,” tutup Tavip.

Editor: Santjojo Rahardjo



Maluku Utara Percepat Penurunan *Stunting* Menuju 14%



Kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Halmahera Timur.

■ Penulis: Dian

BKKBN - Dalam upaya menurunkan prevalensi *stunting* di Maluku Utara, Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan memasifkan kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota.

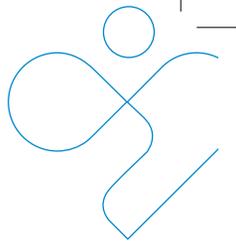
Kegiatan ini dilaksanakan di 10 kabupaten/kota yang tersebar di Provinsi Maluku Utara secara bergiliran. Digerakkan BKKBN yang menjadi “*leading sector*” program percepatan penurunan *stunting* melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan/*stakeholder* dan mitra kerja lainnya.

Peserta kegiatan ini terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah KB, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Permukiman, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dinas Perikanan.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka *stunting* di Maluku Utara turun menjadi 21,6 persen dari 24,4 persen tahun 2021. Untuk lebih menurunkan angka tersebut, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab banyak pihak.

Salah satu intervensi yang dilakukan dan didorong oleh BKKBN di antaranya dalam bentuk pendampingan kepada calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur (*catin/capus*), ibu hamil dan pasca persalinan serta keluarga yang memiliki bayi di bawah usia dua tahun (*baduta*) dan bayi di bawah usia lima tahun (*balita*).

Agar Maluku Utara bisa menurunkan angka *stunting* menjadi 14 persen sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, BKKBN mengembangkan kerjasama bersifat holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.



Adapun Forum Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Maluku Utara tahun 2023 dilaksanakan pertama kali di Kabupaten Pulau Morotai, dilanjutkan ke Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate dan ditutup dengan Kota Tidore Kepulauan.

Pulau Taliabu merupakan salah satu Kabupaten terluar dan terjauh di antara kabupaten/kota yang berada di Provinsi Maluku Utara. Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu menempati sebuah pulau yang dikelilingi beberapa pulau kecil di wilayah Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah darat sebesar ±738,1 km².

Secara geografis, kabupaten ini lebih mudah diakses melalui Luwuk atau Banggai Kepulauan (Sulawesi



Kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* di berbagai wilayah di Provinsi Maluku Utara.



Agar Maluku Utara bisa menurunkan angka *stunting* menjadi 14 persen, BKKBN mengembangkan kerjasama bersifat holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan

Terbentuk 4 Oktober 1999

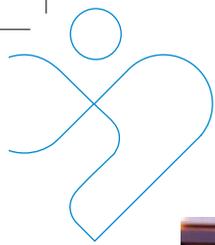
Sebagai salah satu Provinsi termuda dari 33 Provinsi di Indonesia, Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara.

Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribukota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai 4 Agustus 2010. Setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke Kota Sofifi yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar.

Tengah) dibanding dari ibu kota Provinsi Maluku Utara. Secara astronomis, terletak antara 1°34'39–2°04'24 Lintang Selatan dan 124°17'01–125°19'35 Bujur Timur serta berada di antara Pulau Halmahera dan Pulau Sulawesi.

Letak geografis yang terdiri dari pulau-pulau ini bukanlah menjadi halangan bagi BKKBN Maluku Utara untuk terus mengedukasi Masyarakat tentang program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Selain juga pentingnya hidup bersih dan sehat untuk mencegah generasi penerus bangsa dari *stunting*. Targetnya, angka *stunting* di Maluku Utara mencapai 14% pada 2024.

Editor: Santjojo Rahardjo



Acara pelepasan Deputy Bidang KBKR, dr. Eni Gustina, M.P.H. yang telah memasuki masa purna tugas yang dihadiri Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K), Sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si dan seluruh Deputy di BKKBN.

Bermula dari Puskesmas, Deputi BKKBN Ini Pun Purna Tugas

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

SEIRING berjalannya waktu, sering kali tanpa disadari, perjalanan meniti karier sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada akhirnya sampai di pengujung jalan.

Purna Tugas merupakan suatu keniscayaan yang akan dialami oleh setiap ASN. Segala rutinitas pekerjaan yang biasa dilalui, asam manis kehidupan di lingkungan kerja, serta tantangan maupun tugas yang diemban pun terhenti saat tiba waktunya pensiun.

Hal tersebut dialami Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Eni Gustina, M.P.H.

Pada Kamis (31/8/2023) merupakan hari terakhir dr. Eni berstatus sebagai Pimpinan Tinggi Madya di BKKBN dengan masa jabatan 3 tahun 20 hari.

Wanita kelahiran Baturaja, Palembang tersebut telah mengabdikan diri kepada negara sebagai ASN selama 29 tahun lamanya.

Diawali dengan berkarir di sebuah Puskesmas di Kabupaten Karawang, karirnya melesat naik menduduki jabatan-jabatan penting di Kementerian Kesehatan.

Berdasarkan riwayat jabatannya di Kemenkes, pada tahun 2015, dr. Eni menjabat sebagai Kepala Pusat Promosi Kesehatan, kemudian pada 2016 menduduki jabatan sebagai Direktur Kesehatan Keluarga, lalu pada

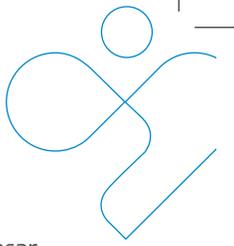


Deputy Bidang KBKR, dr. Eni Gustina, M.P.H. memberikan bingkisan kepada Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K).

2019 naik pada jabatan Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat.

Kemudian dengan segudang pengalaman dan kiprahnya di bidang kesehatan reproduksi, dr. Eni dipercaya untuk diangkat menjadi Deputy bidang KBKR yang dilantik oleh Kepala BKKBN pada 10 Agustus 2020.

Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K) mewakili segenap pimpinan dan para pegawai menyatakan selamat memasuki masa purna tugas diiringi rasa terima kasih kepada dr. Eni yang selama ini telah



bekerja keras mengabdikan diri khususnya di bidang Keluarga Berencana (KB).

“Meskipun sekarang sudah memasuki usia purna tetapi masih bisa lari 10 kilometer. Itu luar biasa maknanya sehat dan masih awet muda. Kami atas nama BKKBN dan seluruh jajaran mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kita bekerja sama. Tentu, tidak ada sama sekali sebiji sawi pun kita tidak ada pemikiran yang negatif terhadap Ibu (dr. Eni). Karena kita bekerja sangat antusias sekali, tidak jarang menimbulkan pergesekan. Gesekan ini positif ibarat gesekan padi yang ditumbuk menjadi beras. Kita berterimakasih sebesar-besarnya atas jasa Ibu Eni di BKKBN,” kata Hasto.

Selain ucapan terima kasih, Hasto juga mengapresiasi prestasi-prestasi yang ditorehkan Eni di BKKBN.

“Begitu banyak hal catatan prestasi yang tidak bisa kita uraikan satu per satu. Terakhir, kita semua mendoakan semoga Bu Eni diberikan Kesehatan, panjang umur, dan cukup mampu untuk mengasuh anak cucunya,” kata Hasto.

Hasto pun sempat membacakan pantun bernada KB yang dikhususkan untuk Eni, yang berbunyi:

***IUD dipasang di mana-mana
IUD dipasang pada pasien pemasangan usia muda
Bu Eni sudah memasuki purna
Tetapi Bu Eni masih sangat kelihatan muda***

membuat Ibu tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu juga ada doa dan harapan, karena saya tahu Bu Eni sebelum pensiun ini juga sudah menyiapkan bisnisnya di bidang kesehatan, dengan membuka klinik di beberapa titik. Semoga sukses dan tetap memberikan pelayanannya kepada masyarakat,” ucap Tavip.

Rasa Kekeluargaan Tinggi

Eni Gustina memohon pamit karena telah selesai masa kerjanya di BKKBN. “Sebelumnya saya menyebut ini bukan perpisahan, melainkan wisuda purnabakti. Per 1 September saya sudah tidak lagi sebagai Deputi, tetapi saya masih sebagai pengabdian negara,” ujar Eni.

Eni juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh komponen di BKKBN. “Saya menghaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala (Hasto Wardoyo) yang telah memberi kepercayaan dan bimbingan. Dan terimakasih juga kepada rekan-rekan PTM lain yang sudah seperti keluarga sendiri, seluruh PTP di pusat dan perwakilan, seluruh staf termasuk security dan para officeboy yang telah sepenuh hati membantu saya selama ini,” kata Eni.

“Saya sadar betul selama bertugas banyak sekali kekurangan sehingga belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya bersyukur berkesempatan untuk bergabung dengan BKKBN, saya belajar banyak di sini, serta mendapatkan masukan. Yang saya rasakan di BKKBN adalah orang-orang dengan motivasi yang kuat,



Suasana penuh kehangatan saat acara pelepasan Deputi Bidang KBKR, dr. Eni Gustina, M.P.H.

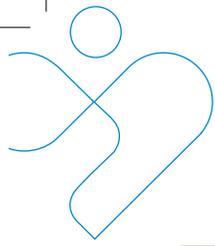
Pantun itu pun sontak disambut teriakan “cakep” Sekretaris Utama BKKBN Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si., turut memberikan ucapan pelepasan kepada Eni Gustina. “Di pengujung waktu, yang berpisah ini hanyalah hubungan pekerjaan formal. Tetapi persaudaraan dan hubungan kekeluargaan saya kira masih tetap berlanjut,” harap Tavip.

“Oleh karena itu, kami atas nama instansi maupun pribadi, kita berinteraksi tentu banyak hal yang mungkin

sangat berjuang, dan rasa kekeluargaan yang tinggi sampai terbentuk Juang Kencana,” ucap Eni.

Lebih lanjut, Eni berharap jajaran BKKBN untuk terus semangat membawa Program Bangga Kencana agar semakin maju, sukses dalam mengemban tugas menurunkan angka *stunting* sehingga BKKBN semakin berjaya.

Editor: Kristianto



Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan berlangsung di Auditorium Kantor BKKBN Pusat.

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala BKKBN: ***Down Grade Diri Bukan untuk Diremehkan, Tapi Suatu Kehormatan***

■ Penulis : Tri Wulandari Henny Astuti

JAKARTA, BKKBN – Kepala BKKBN melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan BKKBN. Mereka terdiri atas tiga pejabat di lingkungan BKKBN Pusat dan dua pejabat untuk posisi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

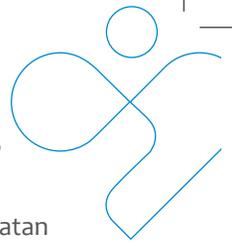
Di tingkat pusat, pejabat yang dilantik adalah Direktur Bina Ketahanan Remaja, Kepala Biro Umum dan Humas, dan Direktur Bina Kesehatan Reproduksi. Dua pejabat lainnya adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

Pelantikan dan pengambilan Sumpah Jabatan berlangsung di Auditorium Kantor BKKBN Pusat, Jakarta Timur, Jumat (01/09/2023). Pelantikan itu dilakukan selang dua hari berlangsungnya penyelenggaraan Rapat Reviu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Nasional. Reviu dilaksanakan BKKBN pada Rabu, 30 Agustus 2023.

“Penyelenggaraan reviu merupakan kegiatan rutin BKKBN setiap semester untuk mengevaluasi capaian-capaian program kegiatan serta kendala dan hambatan yang harus dihadapi selama satu semester,” terang dr. Hasto.

Penilaian kinerja yang dilakukan pada semester pertama ini baru menitikberatkan pada proses dengan menggunakan *balance scorecard*. Mekanisme penilaian yang digunakan berdasarkan unsur penilaian capaian rincian *output*, konsistensi pelaksanaan anggaran, penatausahaan daftar barang, tingkat kedisiplinan ASN, inovasi, apresiasi, evaluasi tim kerja, pengelolaan arsip, penerapan SMAP ISO 37001 dan tindak lanjut audit internal.

Interval penilaian yang digunakan mengacu pada Permenpan No. 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, yakni istimewa, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang.



Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K) saat menyampaikan sambutan.

Hasil penilaian Unit Kerja Eselon (UKE) Pusat dan Provinsi menunjukkan 8,20% memperoleh kategori istimewa, 57,38% memperoleh kategori baik, 27,8% memperoleh kategori cukup dan 6,56% memperoleh kategori kurang.

Pada kesempatan ini dr. Hasto menambahkan, “Mutasi dan rotasi menjadi suatu hal yang biasa ketika kita membutuhkan suatu penyegaran dan pengalaman yang lebih banyak selama kita berkarir. Oleh karena itu manfaatkanlah jabatan yang akan bapak ibu emban yang

baru saja ditetapkan ini untuk keperluan peningkatan kapasitas diri dan juga untuk penilaian optimalisasi manfaat kita kepada publik dan masyarakat.”

Bagi pejabat yang semula bekerja di pusat kemudian ditugaskan menjadi kepala perwakilan, dr. Hasto mengibaratkan seperti ekor harimau di pusat yang kemudian menjadi kepala kucing di daerah. “Kita akan bebas menentukan langkah kebijakan karena sekarang anda menjadi kepala, meskipun kepalanya adalah kepala kucing,” kata dr. Hasto

Kemudian dr. Hasto berpesan, “Mengkoordinir teman-teman yang bekerja di lapangan memang kompleksitas dan tantangannya besar, target dan sarasanya jelas terukur. Indikator-indikator akan mudah dilihat, iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) dan kemudian juga *stunting* akan dilihat orang. Bahkan iBangga akan diperjuangkan menjadi indikator kinerja pemerintah daerah juga, masuk di dalam RPJMD. Maka, kita tidak bisa santai, karena itu akan mejadi hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka,” pesannya.

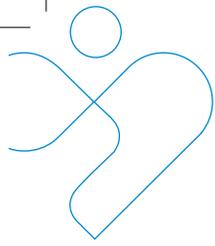
Dr. Hasto mengingatkan bahwa evaluasi capaian dan kinerja akan terus dilakukan setiap enam bulan di dalam Rapat Reviu. Melalui reviu akan terlihat urutan prestasi dan kinerja.

“Pemimpin memang seni, seni memimpin ketika sebagai orang baru yang datang di lingkungan baru tentu bapak/ibu sudah sangat bisa menempatkan diri, menyesuaikan diri. Kunci utama adalah kita *men-down grade* diri itu penting juga. Bahwa *men-down grade* diri itu tentu merendahkan diri, tapi bukan untuk diremehkan, tapi untuk kehormatan kepada para senior yang ada di daerah. Karena banyak para senior yang jauh berpengalaman yang bisa menyelesaikan masalah,” pesan dr. Hasto.

Editor: Santjojo Rahardjo



Pengambilan Sumpah Jabatan saat pelantikan yang berlangsung di Auditorium Kantor BKKBN Pusat.



Kerjasama BKKBN dan Yayasan Kinarya Anak Selamatkan Bumi dan Manusia



BKKBN dan Yayasan Kinarya Anak Bangsa mengembangkan kerja sama dalam upaya menyelamatkan bumi dan manusia yang diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama secara virtual.

■ Penulis: Rizky Fauzia

JAKARTA, BKKBN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Yayasan Kinarya Anak Bangsa mengembangkan kerja sama dalam upaya keduanya menyelamatkan bumi dan manusia.

Kerja sama itu diwujudkan pada Rabu (30/9/23) siang melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) oleh kedua pihak, yang berlangsung melalui zoom.

Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama itu sebagai langkah awal kerjasama BKKBN dengan Yayasan Kinarya Anak Bangsa untuk menyelamatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang merupakan investasi masa depan Indonesia Maju.

“Saya kira penting untuk kita bersama-sama dengan yayasan Kinarya Anak Bangsa yang sudah sangat berpengalaman dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya investasi masa depan, menyelamatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia,” ujar dr. Hasto.

dr. Hasto berpesan agar bersama-sama Kinarya Anak Bangsa, jajaran BKKBN menjaga keluarga agar

menjadi keluarga yang mempunyai ketahanan baik dan berkualitas. Menurut dr. Hasto, kualitas keluarga didukung oleh kualitas anggota keluarga, di antaranya juga anak yang tidak *stunting*. “Kualitas SDM menjadi fokus perhatian yang penting untuk menyambut bonus demografi dan juga menyambut era Indonesia Emas 2045,” ujar dr. Hasto.

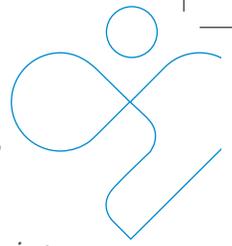
Presiden, kata dr. Hasto, selalu menyampaikan bahwa kesempatan untuk memanfaatkan bonus demografi tidak terjadi dua kali. “Secara teoritis memang kita ada kesempatan bonus kedua. Tetapi bonus kedua apabila penduduk lansia kita berkualitas, berpendidikan tinggi dan berkemampuan ekonomi, punya modal investasi yang besar,” papar dr. Hasto.

Tetapi, lanjut dr. Hasto, Indonesia masih jauh dari itu. Satu-satunya bonus demografi yang bisa diterima adalah bonus demografi pertama, yaitu ketika penduduk kita banyak yang usia produktif sementara yang usia balita menurun dan kemudian yang usia lansia belum terlalu banyak.

“Kondisi inilah yang membuat kesempatan emas bagi anak bangsa untuk bisa menaikkan pendapatan per



Saya kira penting untuk kita bersama-sama dengan yayasan Kinarya Anak Bangsa yang sudah sangat berpengalaman dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya investasi masa depan, menyelamatkan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia



kapita setinggi-tingginya. Karena jumlah yang mencari uang lebih banyak dibandingkan yang membutuhkan uang. Atau jumlah yang produktif yang bekerja lebih banyak dibandingkan dengan yang ditanggung yang tidak produktif,” kata dr. Hasto.

Menurut dr. Hasto, meningkatkan kualitas SDM dimulai dari masa remaja dan anak balita. Mereka berada pada periode-periode emas, mulai dari dalam kandungan hingga 1.000 Hari Pertama Kehidupan.

Kata dr. Hasto, *stunting* menjadi salah satu indikator terkuat untuk menentukan kualitas SDM. Bila indikator *Human Capital Index* negara Indonesia yang sangat dekat dengan mutu fisik dari manusia ini bagus, maka tentu akan produktif.

penanaman dan pemeliharaan pohon. Serta *monitoring* dan evaluasi yang tahun 2023 ini telah mendapatkan pengakuan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York, di *Head Quarter* PBB, sebagai salah satu inisiasi *Sustainable Development Goals* atau inisiatif pembangunan berkelanjutan.

Ketiga, program pemberdayaan perempuan dan peningkatan kapasitas wirausaha serta ekonomi keluarga. Keempat, program penanganan hasil bumi untuk penguatan ketahanan pangan keluarga. Kelima, program pengelolaan serta pengolahan sampah serta ekonomi sirkular.

Ia pun berharap dengan program yang akan dilakukan bersama BKKBN ini, angka perpisahan atau perpecahan



Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K) menandatangani Nota Kesepakatan Bersama dengan Ketua Yayasan Kinarya Anak Bangsa Rosita Yuwanasari. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dilaksanakan secara virtual melalui zoom.

Dokter Hasto mengatakan bahwa hari ini *Human Capital Index* Indonesia di Asia Tenggara masih di urutan nomor 6 di bawah Vietnam dan Filipina.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Yayasan Kinarya Anak Bangsa Rosita Yuwanasari SH,M.KN mengungkapkan bahwa pada dasarnya program lima pilar Kinarya Anak Bangsa memiliki prinsip memanen dari bumi dengan merawat bumi melalui program utama dan program pendamping.

Kinarya Anak Bangsa pada rentang waktu tahun 2020 hingga tahun 2030 menginisiasi lima pilar program utama. Pertama, program pembekalan calon pasangan menikah untuk penguatan ketahanan keluarga, dengan cara mensosialisasikan hukum keluarga untuk dapat mencapai inklusi hukum bagi warga negara Indonesia. Sehingga hukum keluarga dapat dikenal secara luas dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari.

“Yang saat ini kami mohonkan kepada bapak ibu sekalian di BKKBN adalah menjadikan program BKKBN dan Kinarya Anak Bangsa sebagai program untuk memperkuat ketahanan keluarga,” ujarnya.

Kedua, program penanaman mata air melalui

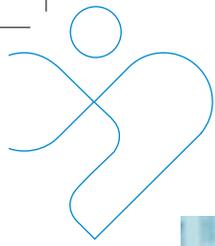
keluarga dapat diturunkan. Dengan cara memberikan pembekalan pasangan yang mau menikah, literasi-literasi hukum ataupun literasi bekal lainnya kepada pasangan yang akan menikah.

Lingkup kesepahaman bersama antara BKKBN dengan Yayasan Kinarya Anak Bangsa adalah advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta sosialisasi program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan penguatan ketahanan keluarga serta percepatan penurunan *stunting*.

Termasuk juga peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya program Bangga Kencana serta penguatan ketahanan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan program Bangga Kencana serta penguatan ketahanan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*.

Juga pemanfaatan data dan informasi program Bangga Kencana serta penguatan ketahanan keluarga dalam percepatan penurunan *stunting*, dan gerakan Bapak Asuh, Bunda Asuh dan Kakak Asuh Anak *Stunting*.

Editor: Santjojo Rahardjo



Perwakilan BKKBN menerima penghargaan kategori nilai persentase transaksi *e-purchasing* terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) terbesar kedua Tahun Anggaran 2023 klaster Kementerian/Lembaga.

BKKBN Raih Penghargaan Transaksi *e-Purchasing* Klaster Kementerian dan Lembaga

■ Penulis: Fitri Aminatul Azizah

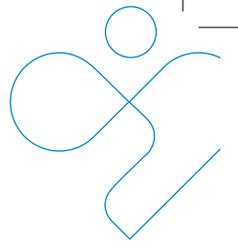
JAKARTA – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berhasil meraih penghargaan kategori nilai persentase transaksi *e-purchasing* terhadap Rencana Umum Pengadaan (RUP) terbesar kedua Tahun Anggaran 2023 klaster Kementerian/Lembaga periode sampai dengan akhir Juli 2023.

Penghargaan diberikan pada Temu Bisnis tahap keenam yang terintegrasi dengan Indonesia *Catalogue Expo and Forum* (ICEF) mengangkat tema “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa” yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian

Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada 3 Agustus 2023.

Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan LKPP Yulianto Prihandoyo, ST, M.T, memberikan apresiasi penuh terhadap BKKBN karena sudah turut berkontribusi dalam memproses pengadaan secara digital dalam hal *purchasing* melalui katalog LKPP.

“Selamat kepada BKKBN sudah mencapai urutan kedua dari kategori persentase realisasi *e-purchasing*



terhadap Rencana Umum Pengadaan Tahun Anggaran 2023,” kata Yulianto.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan ajang yang pertama kali diadakan.

Diketahui, ruang lingkup instansi yang dinilai dalam penghargaan tersebut mencakup seluruh Kementerian/Lembaga.

Yulianto juga menekankan bahwa penilaian ini bersifat transparan. “Publik, termasuk BKKBN juga bisa melihat berapa RUP-nya, kemudian berapa transaksi di katalognya. Kita punya *dashboard*nya, bisa dibuka di laman *website* LKPP *Big Box*,” jelas Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP tersebut.

Menurut Yulianto, setiap Kementerian/Lembaga sudah memasukan Rencana Umum Pengadaannya serta terpantau jumlah yang sudah dieksekusi melalui proses *e-purchasing* katalog.

“Saya berharap, BKKBN ke depannya bisa lebih baik lagi dalam berbelanja melalui *e-purchasing* katalog sekaligus memperhatikan barang-barang Produk dalam negeri,” ujar Yulianto.

dengan peraturan yang ada,” kata Arfan.

Dirinya juga berharap kerjasama BKKBN dan LKPP akan mengeluarkan hasil yang lebih optimal.

Berdasarkan data dari LKPP, dalam penyelenggaraan *e-Purchasing Awards* Tahun Anggaran 2023, hingga semester pertama Tahun Anggaran 2023, BKKBN telah mencapai sebesar 32,06% dari total Rencana Umum Pengadaan di e-Katalog sektoral.

BKKBN juga terus berkomitmen untuk meningkatkan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam setiap proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Dalam meningkatkan P3DN di lingkungan BKKBN, telah dituangkan melalui Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Badan Kependudukan dan



Perwakilan BKKBN menerima penghargaan kategori nilai persentase transaksi *e-purchasing* klaster Kementerian/Lembaga saat Temu Bisnis tahap keenam yang diselenggarakan Kemenkeu, Kemenkumham, LKPP dan KADIN.

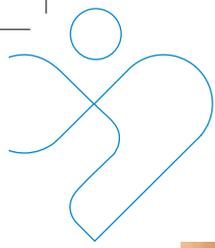
Muhamad Arfan, S.T., MPH selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Rumah Tangga, dan Protokol sekaligus Kepala UKPBJ yang hadir menerima piagam dan plakat penghargaan mewakili Sekretaris Utama, berterima kasih kepada LKPP yang selama ini sangat membantu dalam proses pengadaan di BKKBN.

“Ke depan, BKKBN, Insya Allah akan bersemangat untuk lebih baik lagi dalam memproses pengadaan sesuai

Keluarga Berencana Nasional Sebagai Upaya Mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

Sebagai langkah nyata, BKKBN telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan BKKBN melalui Kepka Nomor 228/KEP/B5/2022 yang diketuai oleh Sekretaris Utama.

Editor: Kristianto



Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K) menerima Dewan Paroki Pengurus Gereja dan Dana Papa (Miskin) Gereja St. Agustinus Halim Perdanakusuma.

Persiapan Tiga Bulan Pranikah untuk Cegah *Stunting*

Kepala BKKBN Apresiasi Dewan Paroki Gereja Katolik Halim Perdanakusuma

■ Penulis: Rizky Fauzia

JAKARTA, BKKBN – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G (K) mengapresiasi Paroki Gereja Katolik yang telah menerapkan persiapan tiga bulan pranikah untuk mencegah *stunting*.

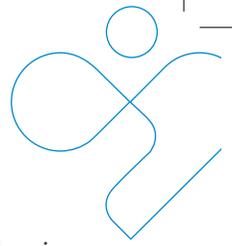
Apresiasi itu disampaikan Dokter Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) saat menerima audiensi dari Dewan Paroki Pengurus Gereja dan Dana Papa (Miskin) Gereja St. Agustinus Halim Perdanakusuma terkait pembahasan Elsimil pada Jumat (25/08/2023) di Ruang Tamu Kepala BKKBN, Jakarta.

Dokter Hasto memberi apresiasi bagi Paroki yang telah menerapkan persiapan pernikahan tiga bulan sebelum pernikahan dilaksanakan karena mempersiapkan

sperma yang sehat atau proses spermatogenesis dapat dihasilkan selama 75 hari.

Menurut Dokter Hasto, kedatangan Dewan Paroki Pengurus Gereja dan Dana Papa (Miskin) Gereja St. Agustinus Halim Perdanakusuma bisa menjadi *best practice* dalam pengisian Elsimil (Elektronik Siap Nikah Siap Hamil) sebelum pernikahan di lingkungan Paroki itu sendiri untuk mencegah *stunting*.

“Karena harapan saya ketika akan dinikahkan (calon pengantin) maka Romo, Pastor atau Paroki yang ada di sana sebelum menikahkan (calon pengantin) diwajibkan mengisi Elsimil dulu. Dan nanti begitu keluar Elsimilnya ada sertifikat Elsimil. Setelah itu itu dibawa ke tempat pernikahannya. Saya berharap bahwa para pemegang



kewenangan untuk menikahkannya itu bisa menanyakan itu biar dia mengisi untuk dapat potraitnya ini siapa yang terlalu kurus, yang Hb nya kurang, alamatnya di mana, nanti kita dampingi,” kata Dokter Hasto.

Dokter Hasto juga mengungkapkan bahwa BKKBN siap memberikan dukungan modul dan materi terkait bimbingan calon pengantin beserta narasumber apabila Dewan Paroki Pengurus Gereja dan Dana Papa (Miskin) Gereja St. Agustinus Halim Perdanakusuma akan membuat kelas pra nikah atau *training of trainer*. Sehingga kegiatan tersebut bisa menjadi *best practice* bagi Paroki-Paroki lainnya.

Sementara itu Pastor Kepala Paroki Halim Perdanakusuma Romo Yos Bintoro mendukung hal-hal yang disebutkan oleh Kepala BKKBN. Karena Dewan Paroki Pengurus Gereja dan Dana Papa Halim Perdanakusuma, Gereja St. Agustinus memang sedang menargetkan para keluarga muda untuk mencegah *stunting* demi kesejahteraan keluarga di lingkungan Paroki Halim Perdanakusuma.

“Ke depan kami melihat di Paroki yang harus kami perhatikan adalah keluarga-keluarga muda. Kami masih punya di lingkungan kami yang menengah ke bawah. Kami punya tema meningkatkan kesejahteraan keluarga dalam arti yang luas, ya yang paling pokok bagaimana keluarga, gizi, pendidikan nah itu target perhatian yang mesti kami perhatikan. Termasuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi,” kata Romo Yos Bintoro.

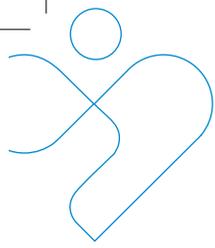
“Kami sudah mendapat 10 pasangan (calon) suami istri. Kami mentor betul jadi kami siapkan mereka jadi kami ikutkan kegiatan ketika mereka mendapatkan seminar atau pendampingan kursus yang namanya membangun keluarga maka mereka siap. Nah hal semacam itu kami targetkan bagi pasangan-pasangan keluarga ini dalam kacamata saya tangguh ya,” jelas Romo Yos Bintoro.

Menurut Romo Yos Bintoro, pihaknya siap mendampingi keluarga-keluarga yang rentan dari berbagai macam hal, seperti sosial, budaya, dan terutama ekonominya.

Editor: Kristianto



Kepala BKKBN Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.O.G(K) saat audiensi dengan Dewan Paroki Pengurus Gereja dan Dana Papa (Miskin) Gereja St. Agustinus Halim Perdanakusuma. BKKBN siap memberikan dukungan modul dan materi terkait bimbingan calon pengantin beserta narasumber.



Kepala BKKBN Beri Warna Baru Konawe Selatan

Motivasi Akseptor KB dan Kukuhkan BAAS



Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) mengukuhkan Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS) dalam kegiatan pelayanan KB di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/8/2023).

■ Penulis : Iklamin/Melta

KENDARI, BKKBN – Kehadiran Kepala BKKBN, Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K), memberikan warna baru bagi program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, ditandai dengan dikukuhkannya Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

Pengukuhan BAAS oleh dr. Hasto Wardoyo itu berlangsung bersamaan dengan kegiatan pelayanan KB di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Rabu (23/8/2023). Pelayanan KB tersebut bertempat di Puskesmas Palangga.

BAAS yang dikukuhkan saat itu berjumlah delapan orang, terdiri dari Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kemenag, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan.

Selesai mengukuhkan BAAS, Kepala BKKBN, dr. Hasto Wardoyo mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam program Percepatan

Penurunan *Stunting*.

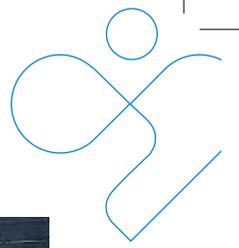
Dalam paparan, Kepala BKKBN menyampaikan kembali penegasan Presiden bahwa Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan karena bangsa ini memiliki potensi meraih manfaat atas bonus demografi. “Oleh karenanya *stunting* harus bisa diatasi,” ujar Hasto.

Penentu bonus demografi adalah generasi muda. Apabila generasi muda dapat mengatur kelahiran, maka *stunting* dapat dihindari, ujar Hasto.

Penegasan Presiden bahwa pembangunan keluarga merupakan fondasi utama tercapainya kemajuan bangsa, menurut dr. Hasto, hal ini sejalan dengan program BKKBN tentang 8 Fungsi Keluarga.

Dr. Hasto mengatakan, orang *stunting* cenderung tidak produktif. Sehingga hitungan pemerintah apabila *stunting* sudah di angka 14 persen, bangsa ini akan berada di kondisi yang sehat.

Dikatakan, KB merupakan program wajib yang harus



Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) foto bersama Bupati Konawe Selatan, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kemenag, Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan usai pengukuhan.

dijalankan BKKBN dan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layanan. Masyarakat diharapkan memahami manfaat program KB yang dapat mempercepat penurunan risiko anak *stunting*.

Sempat berbincang dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), dr. Hasto juga menyampaikan usia sehat untuk menikah dalam mencegah terjadinya *stunting* adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, termasuk pentingnya menjaga tekanan darah maupun hemoglobin (Hb) bagi remaja maupun calon pengantin. Kepala BKKBN berharap semua kader dan TPK paham tentang makna *stunting*.

“BKKBN juga memiliki Satgas *Stunting* yang siap membantu percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Konawe Selatan,” lanjut Hasto.

Salah satu sebab *stunting* adalah kekurangan asupan gizi, bayi tidak diberikan ASI eksklusif, pola asuh yang

kurang tepat, bayi sering sakit hingga jamban atau sanitasi yang belum sesuai standar.

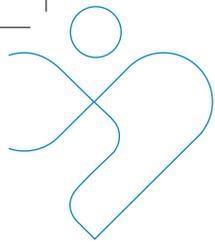
“Sanitasi dan makanan harus bagus. Parenting atau pola asuh juga harus baik, anak harus digembirakan dan mengatur jarak kelahiran anak atau menghindari 4T serta merencanakan kehamilan dengan baik. Maka, kalau mau hamil jangan main-main, dan kalau main-main jangan hamil karenanya harus memakai alat kontrasepsi,” ujar Hasto.

Yang dimaksud 4T adalah Terlalu muda hamil, Terlalu tua hamil, Terlalu dekat jarak kelahiran anak, Terlalu banyak anak. Adapun jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapat layanan KB dari Perwakilan BKKBN Sultra dan Kabupaten Konawe Selatan saat kegiatan itu sebanyak 216 akseptor. Rinciannya, IUD 3 akseptor, suntik 26 akseptor dan implan 187 akseptor.

Editor: Santjojo Rahardjo



Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo Sp. OG (K) meninjau kegiatan pelayanan KB di Desa Wawonggura, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan.



Cegah *Stunting* Melalui Pelayanan KB **BKKBN Sulbar-Sulsel Kolaborasi di Wilayah Perbatasan**

■ Penulis : Martin & Eka

MAMUJU, BKKBN - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar pelayanan Keluarga Berencana (KB) di perbatasan provinsi. Tepatnya di Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Selasa (22/8/2023).

Pelayanan KB perbatasan ini bekerjasama dengan BKKBN Sulawesi Selatan (Sulsel) yang juga menggelar Pelayanan KB di RSUD Madising, Desa Bung, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada hari yang sama.

Pelayanan KB perbatasan pada kegiatan tersebut menyentuh ratusan akseptor, dan akan terus berlanjut di Sulbar. Tahap kedua berada di Kabupaten Pasangkayu. Terdapat pula program KB “Keroyok Pesisir” yang akan dilaksanakan BKKBN Sulbar.

Menjangkau akseptor yang jauh dari fasilitas kesehatan merupakan tujuan dari kegiatan itu. Selain juga meningkatkan kesertaan KB, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), sebagai salah satu upaya percepatan penurunan *stunting* di wilayah khusus seperti perbatasan antar provinsi.

Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, M.Rep. Sc, PhD, Deputy Pelatihan dan Pengembangan BKKBN RI yang hadir pada kegiatan tersebut, mengapresiasi dukungan jajaran TNI serta BKKBN Sulbar dan Sulsel dengan melakukan pelayanan KB perbatasan.

“Semoga model pelayanan KB perbatasan ini bisa menginspirasi provinsi lain, terutama terkait distribusi dinamis alat kontrasepsi, bagi provinsi yang kekurangan juga bisa terbantu,” ungkap Prof. Damanik.

Harapannya, melalui kegiatan ini pertukaran informasi antara Sulbar dan Sulsel tersampaikan dengan baik, sekaligus sebagai tempat berkumpul antara bidan, kader dan Penyuluh KB dari kedua provinsi.

Terkait evaluasi dari kegiatan ini, Prof. Damanik menyampaikan bahwa kinerja kedua provinsi sudah baik, hanya perlu ditingkatkan. “Performa yang sudah baik agar ditingkatkan terutama untuk percepatan penurunan *stunting*. Maksimalkan media komunikasi yang ada

kepada akseptor atau calon akseptor dari dua wilayah,” ujar Prof. Damanik mengingatkan.

“Suatu hal yang luar biasa bila bisa saling belajar, misalnya di Sulbar sudah memberikan informasi menggunakan video-video singkat. Sulsel bisa belajar. Begitupun sebaliknya,” tutur Prof. Damanik di tengah pelayanan gratis kontrasepsi BKKBN Sulbar seperti implant, IUD, suntik, pil dan kondom.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, menjelaskan bahwa akseptor merupakan peserta Keluarga Berencana Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi sasaran sosialisasi KB.

“KB sendiri merupakan salah satu cara untuk mencegah *stunting* yang selama ini menjadi perhatian khusus. Karenanya, pelayanan KB di perbatasan bersama BKKBN Sulsel merupakan bentuk sinergitas yang harus diperlihatkan,” kata Rezky.

Harapan Rezky, kegiatan yang digelar ini dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ingin melakukan pelayanan KB. “KB dapat menghindari 4T, yakni terlalu muda (menikah), terlalu tua (hamil), terlalu dekat (jarak kelahiran), dan terlalu sering (melahirkan),” terang Rezky.

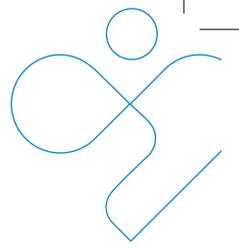
Dikatakan, KB merupakan program wajib yang harus dijalankan BKKBN dan pemerintah melalui penyediaan fasilitas layanan. Masyarakat diharapkan memahami manfaat program KB yang dapat mempercepat penurunan risiko anak *stunting*.

Adapun jumlah PUS yang mendapat layanan KB dari Perwakilan BKKBN Sulbar sebanyak 91 akseptor. Rinciannya, suntik 17 akseptor, implan 46, pil 21, dan kondom 7 akseptor.

Sementara capaian layanan KB Perwakilan BKKBN Sulsel mencapai 47 akseptor. Sebanyak 45 akseptor implan dan 2 akseptor IUD.

Total layanan KB mencapai 138 akseptor untuk Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kegiatan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga dan Pengukuhan BAAS di Gedung Olahraga Kantor Walikota Pangkalpinang.

Walikota Pangkalpinang Pasang Target, Prevalensi *Stunting* 10% Tahun Ini

■ Penulis: Feriani Padriah

PANGKALPINANG, BKKBN – Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil, menargetkan prevalensi *stunting* di wilayahnya turun menjadi 10% tahun 2023 dari 12,9% tahun 2022. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGO) 2022, angka ini berada di bawah nasional 21,6%.

Hal itu dikatakan Walikota pada kegiatan Pembinaan Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Pengukuhan Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS), di Gedung OR Kantor Walikota Pangkalpinang, Kamis (31/8/2023).

Kegiatan yang diselenggarakan OPD KB Kota Pangkalpinang ini sekaligus dirangkai dengan pengukuhan Walikota Pangkalpinang dan Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS).

Ikut dikukuhkan Kepala DP3AKB Kota Pangkalpinang, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pangkalpinang, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pangkalpinang dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Pangkalpinang.

Walikota menyatakan harapannya bahwa ke depan seluruh kepala dinas pemerintah kota Pangkalpinang bakal menjadi BAAS.

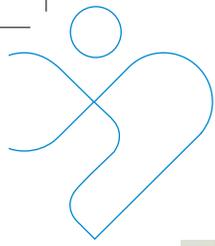
Komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* juga dituangkan melalui Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 19 Tahun 2023.

Walikota mengatakan gerakan percepatan penurunan *stunting* merupakan tanggungjawab bersama seluruh anak bangsa. Bukan hanya pemerintah saja, namun perlu peran serta masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Pemberian telur kepada anak *stunting*, kata Walikota, terus dilakukan. Kehadiran Tim Pendamping Keluarga juga sangat membantu percepatan penurunan *stunting*. Tim ini berada di 42 kelurahan, sebanyak 146 tim, terdiri dari 438 personil yang melibatkan bidan, kader PKK dan kader KB.

“Mereka diharapkan dapat memberikan edukasi *stunting* kepada masyarakat dan mendampingi keluarga berisiko *stunting* dengan maksimal. Sehingga target percepatan penurunan *stunting* dapat tercapai,” jelas Walikota.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kegiatan “SEJATI” (Sekolah Jenius Atasi *Stunting*), sebuah branding yang menyasar generasi muda terlibat program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan Percepatan Penurunan *Stunting* di Maluku Utara.

Sekolah Jenius Atasi *Stunting*

Modul Kurikulum Berbasis Gizi dan Kesehatan

■ Penulis: Dian Windriyanti

MALUKU UTARA, BKKBN – Keberadaan pemuda bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi, pemuda memiliki banyak energi untuk mendorong kemajuan pembangunan. Di sisi lain, pemuda juga bisa menjadi beban negara dan masyarakat apabila potensinya tidak teraktualisasi dan tidak dimanfaatkan dengan baik.

Definisi pemuda menurut peraturan perundang-undangan adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16-30 tahun. Definisi ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2022 sebanyak 68,82 Juta jiwa penduduk Indonesia masuk kategori pemuda. Angka tersebut mencapai 24 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara pemuda laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga sebanyak 16,12 persen dan pemuda perempuan hanya 1,13 persen.

Maka, beberapa elemen masyarakat, termasuk sosok Reformers Ansar Djainahu, S.Sos, menilai penting

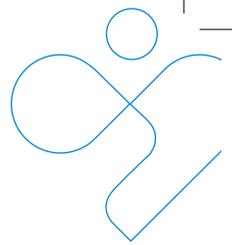
mengajak generasi muda berperan aktif dalam percepatan penurunan *stunting*.

Sasarannya adalah siswa/i SMA. Pendekatannya melalui metode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Metode ini pada intinya menjelaskan betapa pentingnya perilaku kesehatan bagi remaja.

Adalah “SEJATI” (Sekolah Jenius Atasi *Stunting*), sebuah branding, mendapat apresiasi dan dukungan BKKBN Maluku Utara. Melalui *branding* ini diharapkan generasi muda “terkontaminasi” program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana), dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* mengamanatkan Kepala BKKBN selaku ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana yang telah ditargetkan sebesar 14 persen pada tahun 2024.

Untuk mencapai target 14 persen *stunting* pada 2024, diperlukan konvergensi lintas program dan lintas



sektor. Upaya ke arah sana dilakukan pemerintah dan banyak pihak, termasuk generasi muda, di tengah masifnya perbaikan status gizi masyarakat. Perbaikan gizi merupakan salah satu agenda prioritas pembangunan kesehatan.

Secara umum, status gizi masyarakat Indonesia telah meningkat dari tahun ke tahun. Namun masih terdapat beberapa indikator gizi yang perlu diperbaiki. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 menunjukkan 21,6 persen anak mengalami *stunting*.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2018, kekurangan anemia dialami sebagian besar generasi muda perempuan Indonesia dari kelompok umur 15-24 tahun. Jumlahnya 84,6 persen. Sementara itu, Laporan Nutrisi Global tahun 2020 mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara yang mengalami dua masalah gizi utama, yaitu anemia dan *stunting*.

Faktor penyebab masalah gizi sangat kompleks. Tidak hanya terkait akses pelayanan kesehatan dan kecukupan asupan makanan bergizi, tetapi juga terkait perilaku masyarakat. Perubahan perilaku merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah *stunting*.

Perubahan perilaku akan lebih mudah terjadi apabila menyentuh emosi kelompok sasaran. Upaya perubahan perilaku perlu dilakukan dengan merancang sebuah metode pembelajaran melalui modul pembelajaran BCD (*Behavior Centre Design*).

Modul ini dimulai dari sekolah-sekolah yang lebih memfokuskan pembelajaran pada perubahan pengetahuan sejak dini, yang secara emosional dapat mempengaruhi perilaku manusia.

SEJATI merupakan suatu aksi perubahan yang mempunyai sederet manfaat. Antara lain, meningkatkan kinerja bidang pendidikan dan kebudayaan dalam menghasilkan SDM Indonesia berkualitas dan berkarakter.

Manfaat berikutnya, mengikutsertakan profesi kesehatan berkontribusi dalam perubahan perilaku, memudahkan bagi organisasi untuk berpartisipasi dalam program pencegahan *stunting* dari hulu.

Manfaat lainnya, memudahkan kerja-kerja kolaborasi dalam pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sumber daya manusia, serta membantu kinerja visi dan misi pemerintah daerah demi membangun sumber daya yang berkualitas di masa depan.

SEJATI juga bertujuan mewujudkan modul kurikulum berbasis gizi dan kesehatan (1.000 HPK), terselenggaranya pembelajaran dengan berpedoman pada modul gizi dan kesehatan di SMA, serta tersedianya Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang kurikulum *stunting*.

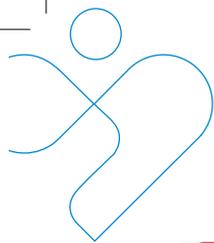
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara, Nuryamin, S.TP, MM, sangat mendukung aksi perubahan ini. “Saya beserta jajaran mendukung aksi perubahan SEJATI yang digagas Reformier Ansar Djainahu, S.Sos. Dukungan ini menjadi inspirasi untuk kesuksesan aksi perubahan.”

Nuryamin menaruh harapan besar bahwa dengan adanya SEJATI, Percepatan Penurunan *Stunting* melalui Program Bangga Kencana dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Sehingga mampu meningkatkan daya guna dan manfaat bagi generasi muda di Maluku Utara.

Editor: Santjojo Rahardjo



Perwakilan BKKBN Maluku Utara saat Kegiatan “SEJATI” (Sekolah Jenius Atasi *Stunting*).



Kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Alumni Akabri 89 yang digelar di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat

Bakti Sosial & Kesehatan Digelar

BKKBN-POLRI-TNI Sinergi Turunkan *Stunting*

■ Penulis: Martin & Eka

MAMUJU, BKKBN - Alumni Akabri 89 menggelar kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat.

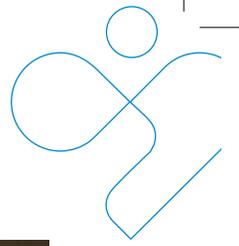
Kegiatan dalam rangka 34 Tahun Pengabdian Akabri 1989 ini dihadiri oleh Kapolda Sulawesi Barat sebagai ketua pelaksana, Danrem 142 Tatag Mamuju, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulbar, Kepala Pengadilan Tinggi Sulbar, Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Barat, dan anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia ini mengusung tema “Pengabdian TNI dan Polri Tiada Henti Untuk Indonesia Maju”. Kegiatan Bakti Kesehatan kali ini menurunkan kurang lebih 75

tenaga kesehatan yang berasal dari dari Pers Bid Dokkes Sulbar, Tim Kesehatan Korem 142 Tatag Mamuju, Dinas Kesehatan Prov. Sulbar, BKKBN Prov. Sulbar, PMI Prov. Sulbar, dan IDI Cab. Mamuju.

Adapun jenis kegiatan kesehatan yang dilaksanakan berupa pelayanan kesehatan umum, pengobatan dan pemeriksaan gigi, donor darah, pemeriksaan lab. darah meliputi gula, kolesterol dan asam urat dan pelayanan bagi penderita *stunting*. Selain kegiatan bakti kesehatan, dilaksanakan pula penyaluran bantuan sejumlah 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu.

Sementara Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Drs. R. Adang Ginanjar mengingatkan bahwa pengabdian adalah inti dari profesi TNI dan Polri sebagai semangat untuk



Kegiatan pelayanan masyarakat saat Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Alumni Akabri 89 yang digelar di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat.

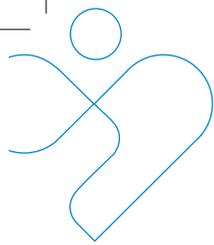
terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, dalam wawancara yang dilakukan menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi kegiatan di lapangan bersama TNI/ Polri, Petugas Kesehatan, Penyuluh KB, Remaja GenRe, di mana terdapat pelayanan KB, pelayanan kesehatan, posyandu,

dan donor darah. “Kemitraan penthaelix harus terus dilakukan, tidak hanya kegiatan seremonial maupun rapat-rapat koordinasi tetapi langsung intervensi ke masyarakat. Dengan mendekatkan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan KB, maka *unmet need* KB dapat diturunkan,” ungkap Rezky. Diharapkan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah sekitar dan membantu percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Sulawesi barat. “Perlu langkah intervensi lanjutan sehingga *stunting* di Sulbar dapat segera diturunkan dan menghasilkan anak-anak bebas dari *stunting*,” lanjut Rezky.

Editor: Santjojo Rahardjo



Peserta kegiatan Bakti Sosial dan Bakti Kesehatan Alumni Akabri 89 foto bersama di Lapangan Ahmad Kirang, Mamuju, Sulawesi Barat.



Tingkatkan Kualitas Rumah Dataku Perlu Keterlibatan Lintas Sektor

■ Penulis : Siefa Fauziah dan Chathiyana Fafilaya

BKKBN --Tersedianya data dan informasi penduduk yang valid dan terpercaya menjadi faktor penting dalam perencanaan dan intervensi pembangunan hingga ke tingkat desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, diamanatkan bahwa desa memiliki otoritas dalam melaksanakan perencanaan dan intervensi pembangunan. Maka, dibutuhkan data informasi penduduk di tingkat desa. Keberadaan Rumah Data Kependudukan atau yang biasa disebut Rumah Dataku sangat penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Rumah Dataku berfungsi sebagai pusat data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber, baik data primer maupun data sekunder.

Secara konsep, Rumah DataKu adalah kelompok kegiatan (Poktan) masyarakat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, verifikasi, analisis, penyajian serta pemanfaatan data kependudukan dan keluarga serta pembangunan di tingkat desa/kelurahan.

Pada dasarnya, Rumah DataKu merupakan poktan yang mandiri. Data yang dimiliki Rumah DataKu dapat dimanfaatkan lintas sektoral, baik pemerintah pusat,

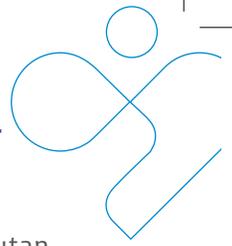


Ketua Tim Rumah Data Kependudukan, Ubang Sobari menjelaskan sejumlah data yang dipajang di setiap sudut Rumah Dataku.

daerah, maupun stakeholder. Tahun 2017, BKKBN Pusat menginstruksikan kepada seluruh BKKBN provinsi agar membentuk Rumah Dataku di setiap kampung KB.



Bimbingan terkait pengelolaan Rumah Dataku.



Perlu diketahui bahwa Rumah Dataku dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu Sederhana, Lengkap, dan Paripurna. Apabila mengacu pada Inpres Nomor 3 Tahun 2022 terkait optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas disebutkan bahwa di setiap desa atau kelurahan harus dibentuk Rumah Dataku.

Provinsi Banten memiliki sebanyak 1552 desa atau kelurahan. Sementara, pusat menargetkan 75 persen

kondisi geografis yang masih didominasi hutan menyebabkan kondisi sinyal yang kurang baik sehingga menjadi faktor hambatan utama dalam pengelolaan Rumah Data Kependudukan.

Lain halnya dengan kota-kota besar. Faktor keterbatasan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana merupakan faktor penghambat dalam pengelolaan Rumah Dataku. Ubang juga mengatakan bahwa pihaknya telah melaksanakan pelatihan secara rutin kepada pengelola atau kader Rumah Data Kependudukan sebagai bentuk penguatan informasi dan peningkatan kapasitas bagi pengelolaan rumah data itu sendiri.

Pada pelatihan ini, para kader diajarkan bukan hanya sebagai pengumpul data, namun sebagai pengelola data. Sehingga data yang dihasilkan mudah dibaca dan dimengerti baik oleh pemangku kebijakan ataupun masyarakat awam. Selain kader pendata, para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai Pembina wilayah juga ikut dilibatkan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Ir Rusman Efendi, MM mengatakan bahwa diperlukan *update* data di Rumah DataKu setiap bulan, sehingga data yang dihasilkan dapat dijadikan data dasar dalam pelaksanaan intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *stunting*.

“Rumah Data Kependudukan sebenarnya embrio untuk menyiapkan data-data kependudukan yang salah satunya data keluarga berisiko *stunting*. Data tersebut bisa juga menjadi dasar dalam melakukan intervensi program percepatan penurunan *stunting*,” ungkap Rusman.

Rusman juga meminta agar pengelola Rumah DataKu dapat meningkatkan keterampilan dalam hal cakupan dan pemanfaatan data serta kemampuan pemanfaatan teknologi informasi manajemen dan integrasi data Rumah DataKu dan SIGA (Sistem Informasi Keluarga). Sehingga dapat meningkatkan klasifikasi Rumah DataKu menjadi paripurna.

“Data dan informasi yang di Rumah Dataku harus berkualitas ini sangat penting. Ini karena tidak hanya digunakan perencanaan pembangunan nantinya, tapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun kebijakan di desa/kelurahan dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat,” ujar Rusman.

Menurut Rusman, Rumah Dataku perlu dukungan serta kepedulian lintas sektor, bukan hanya BKKBN saja. Sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas Rumah Data Kependudukan di desa/kelurahan.



Masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan Rumah Dataku.

dari jumlah Kampung KB di dalamnya sudah terbentuk Rumah Dataku.

Saat ini provinsi Banten baru membentuk Kampung KB sebanyak 884 Kampung KB dari target yang ditetapkan di tahun 2023 ini sebanyak 1.161 Kampung KB. Artinya, 446 Rumah Dataku harus sudah terbentuk dan terus meningkat sesuai target 873 Rumah Dataku.

Berdasarkan laporan di *New Siga* sampai per 18 Agustus 2023, Provinsi Banten memiliki Rumah Dataku sejumlah 321 Rumah Dataku, terdiri atas 165 klasifikasi sederhana, 3 klasifikasi lengkap, dan 153 klasifikasi paripurna.

Tentunya jumlah tersebut masih sangat jauh dari target yang ditentukan. Gap ini lah yang tengah dikejar oleh BKKBN Banten melalui pendampingan, *monitoring* dan evaluasi Rumah Data Kependudukan di Provinsi Banten.

Ketua Tim Rumah Data Kependudukan, Ubang Sobari mengatakan berdasarkan hasil dari *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pembentukan atau peningkatan klasifikasi Rumah Dataku.

Setiap kabupaten atau kota memiliki permasalahan berbeda. Kabupaten Lebak dan Pandeglang misalnya,

Editor: Santjojo Rahardjo



Sosialisasi dan KIE di Kabupaten Banjar, Kalsel.

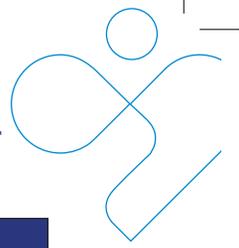


Sosialisasi dan KIE di Kabupaten Banjar, Kalsel.

SOSIALISASI DAN KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama anggota DPR-RI digelar dibarbagai wilayah. Para wakil rakyat bersinergi dengan BKKBN dan pemerintah daerah mengedukasi masyarakat untuk menurunkan angka stunting di wilayah masing-masing. Seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Desa Patas, Kecamatan Gerokgok, Kabupaten Buleleng dan Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman belum lama ini.



Sosialisasi dan KIE di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.



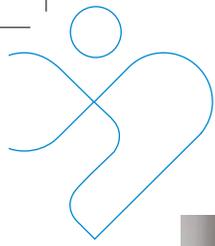
Sosialisasi dan KIE di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.



Sosialisasi dan KIE di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.



Sosialisasi dan KIE di Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.



Sejumlah pejabat yang hadir pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-39 Tahun 2023 tingkat Kabupaten Ciamis (Jawa Barat), Kamis (24/8/2023).

Pembangunan Kependudukan Bergeser, Fokus Pada Percepatan Peningkatan Kualitas Penduduk

■ Penulis: Santjojo Rahardjo

BANDUNG, BKKBN - Tantangan pembangunan kependudukan di Indonesia tidak lagi berfokus pada pengendalian kuantitas, pencegahan ledakan penduduk dan penekanan jumlah kelahiran. Tetapi telah bergeser pada kesenjangan *Total Fertility Rate* (TFR) antar wilayah dan upaya percepatan peningkatan kualitas penduduk, pendidikan, dan IQ.

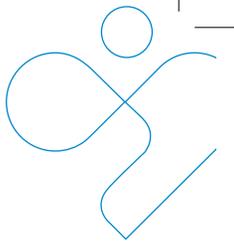
Hal itu dikemukakan Plt. Direktur KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) BKKBN, Dr. Dadi Roswandi M.Si, pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-39 Tahun 2023 tingkat Kabupaten Ciamis, di Kecamatan/Kabupaten Ciamis (Jawa Barat), Kamis (24/8/2023).

Dadi Roswandi mengatakan Jawa Barat telah mengalami tren penurunan prevalensi *stunting* yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Namun

prevalensi *stunting* provinsi ini masih di atas ambang batas standar WHO (Badan Kesehatan Dunia), yaitu 20 persen, sehingga masih kategori darurat *stunting*.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi *stunting* Jawa Barat berada pada angka 20,2 persen. Sedangkan angka *stunting* Kabupaten Ciamis berdasarkan data SSGI 2022 sebesar 18,6 persen. “Walaupun kita tahu bahwa target Jawa Barat adalah *Zero New Stunting*,” ujar Dadi.

Jawa Barat sebagai penyangga capaian program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) nasional, dan juga percepatan penurunan *stunting*, merupakan provinsi terbesar nomor satu dalam jumlah penduduk, menurut Dadi, wajib mengembangkan inovasi dan kreasi melalui berbagai kolaborasi dalam mencapai



target pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024.

Di depan Wakil Bupati, Forkopimda, Kepala Perwakilan BKKBN Jabar, Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Ciamis, Ketua TP PKK dan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ciamis, para Camat, dan elemen masyarakat, Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, dalam sambutannya menyinggung soal pembangunan non fisik.

Dia mengatakan bahwa pembangunan di Ciamis tidak hanya terpusat pada infrastruktur fisik saja tetapi juga non fisik. “Harus seimbang antara pembangunan fisik dan non fisik seperti kesehatan dan keluarga yang sama-sama penting,” tandas Herdiat.

Menyinggung gegap gempitanya pelaksanaan program KB di era 10 tahun lalu, Herdiat mengatakan hampir setiap tahun Pendopo Kantor Bupati Ciamis limpa ruah dipenuhi para Kader KB yang melaksanakan aktifitas.

“Saat itu Kepala BKKBN Kabupaten Ciamis dijabat bapak H. Rukman. Kehadirannya membawa angin segar dan kebaikan bagi pembangunan non fisik di Ciamis,” ungkap Bupati.

Dalam memeriahkan peringatan Harganas ke-30, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kabupaten Ciamis menggelar lomba Siloka Kencana (Silaturahmi Lomba Kader Keluarga Berencana) tingkat kecamatan.

Editor: Kristianto



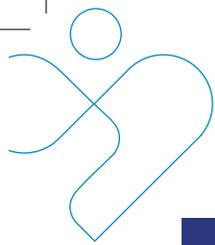
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya



Pemberian hadiah pemenang lomba Siloka Kencana tingkat kecamatan.



Penampilan seni tari pada peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30 dan Hari Anak Nasional (HAN) ke-39 Tahun 2023 tingkat Kabupaten Ciamis.



64 Persen Anak *Stunting* Tinggal Dalam Keluarga Dengan Perokok

■ Penulis: FX Danarto SY

SLEMAN, BKKBN – Di Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta), keluarga dengan perokok tinggal di dalamnya mempunyai risiko anak *stunting* lebih besar. Data menunjukkan, sebanyak 64 persen anak *stunting* di Kabupaten Sleman tinggal pada keluarga dengan perokok.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Wildhan Solichin, saat mengawali penyampaian materi pada Sosialisasi Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja Komis IX DPR RI, H. Sukamto, Senin (28/08/2023). Kegiatan ini berlangsung di aula Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman.

“Maka, para bapak saya ajak untuk tidak merokok di dekat orang yang tidak merokok. Apalagi di dekat anak dan ibu hamil,” ajak Wildan yang berharap prevalensi *stunting* di wilayahnya semakin turun.

Diketahui pula, bahwa 95 persen anak *stunting* berasal dari keluarga tidak miskin, dan hanya 5 persen anak *stunting* merupakan anak dari keluarga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa *stunting* berkaitan erat dengan pola asuh dan pola makan anak.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi IX DPR RI H. Sukamto mengajak para tokoh masyarakat, anggota Tim Pendamping Keluarga, serta perangkat desa di Kapanewon Berbah yang hadir dalam sosialisasi untuk benar-benar menganggap penting permasalahan *stunting* ini.

“Maka, hidup berkeluarga harus direncanakan dengan baik, termasuk dalam hal anak. Direncanakan terkait jumlah anaknya, serta jarak kelahirannya,”

demikian disampaikan Sukamto. Dengan demikian maka risiko anak menjadi *stunting* dapat diperkecil.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Andi Ritamariani, dalam paparannya menyampaikan bahwa Komisi IX DPR RI merupakan salah satu mitra kerja BKKBN. Ritamariani menyampaikan tiga hal yang harus diperhatikan terkait *stunting*. Apa itu *stunting*, apa penyebabnya, dan bagaimana mencegahnya.

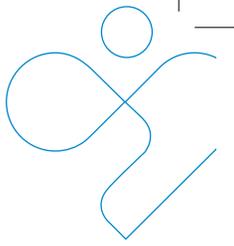
Dia juga menambahkan bahwa tugas BKKBN terkait perencanaan hidup berkeluarga yang sehat. Salah satunya terwujud melalui pengaturan jarak ideal antar kelahiran, usia ideal untuk hamil dan melahirkan.

“Jadi, BKKBN tidak melarang atau mencegah kehamilan atau memiliki anak. Namun kami mempunyai tugas agar keluarga dapat menjaga jarak kelahiran, agar terbebas dari *stunting*,” jelas Ritamariani.

Dengan jarak kelahiran yang ideal, kata Ritamariani, pengasuhan anak dapat dilakukan dengan baik dan kesehatan ibu terjaga. Ritamariani juga kembali mengingatkan agar selalu memperhatikan 4T dalam merencanakan kehamilan, yaitu jangan terlalu tua atau terlalu muda untuk hamil, jangan terlalu dekat jarak antar kelahiran, serta yang terakhir jangan terlalu sering melahirkan.

Hadir pada kegiatan ini anggota DPRD Sleman, Rahayu Widi Nuryani; Panewu Berbah Tri Akhmeriyadi, serta Lurah Kalitirto Arihadi. Sekitar 100 orang memenuhi aula Kalurahan Berbah mengikuti dengan tekun sosialisasi dengan fokus bahasan mengenai pencegahan *stunting*.

Editor: Santjojo Rahardjo



Agar Menjadi Generasi Berkarakter, Siswa SMA Diskusi Soal Seksualitas

■ Penulis : Satya Utama Nugraha

BKKBN – Tantangan yang dihadapi ke depan menjadi tugas yang tidak mudah bagi para pendidik untuk membentengi para siswa dari berbagai dampak negatif di era digital saat ini.

Karenanya, kehadiran BKKBN melalui program Pendidikan Kependudukan, Kesehatan Reproduksi dan Generasi Berencana sangat relevan dengan kondisi dan permasalahan remaja saat ini.

Berharap intervensi BKKBN, Nengah Suwirya, S.Pd. Gr selaku Wakil Kepala Sekolah SMA Fransiskus Bandar Lampung menilai perlunya remaja dibekali *soft skill* dan karakter yang kuat agar menjadi generasi tangguh dan berjiwa besar.

Selanjutnya, disampaikan juga tentang sepuluh dimensi kesiapan berkeluarga bagi generasi muda, dan lima transisi kehidupan, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melanjutkan pendidikan, menciptakan/mencari pekerjaan, menjadi anggota masyarakat dan memulai kehidupan berkeluarga.

Dijelaskan oleh Duta Genre Lampung 2023, Muhammad Gilang F, bahwa generasi muda yang memiliki perencanaan dalam mempersiapkan lima transisi kehidupan akan mampu melangsungkan jejang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana dan menikah dengan penuh perencanaan sesuai fase reproduksi sehat.

Sederet pernyataan itu mengemuka saat berlangsungnya pemberian informasi, pembelajaran bahkan penyadaran tentang seksualitas kepada siswa SMA Fransiskus Bandar Lampung dalam Diskusi Asik Pendidikan Kependudukan dengan tema “*Loving and Caring Our Body*”.

Gelaran yang berlangsung di aula sekolah tersebut diikuti siswa kelas XII sebanyak 215 siswa, berlangsung beberapa hari lalu. Diharapkan, setelah siswa mendapatkan edukasi ini, mereka akan memiliki pengetahuan yang benar dan mampu berlaku tepat dalam menjaga keselamatan diri dan kesehatan tubuh sedari dini.

Sekolah merupakan tempat terjadinya proses pembelajaran. Artinya, di sekolah anak menerima semua materi pembelajaran oleh guru. Termasuk juga materi pendidikan seks. Namun materi mengenai pendidikan seks saat ini sangat sensitif untuk dibicarakan di depan siswa.



“Hal ini mengakibatkan siswa tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai seksual karena kekeliruan persepsi antara orangtua maupun guru,” ujar Nengah Suwirya.

Jika melihat kekerasan seksual terhadap anak merupakan kasus tertinggi di Indonesia saat ini, kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan program pencegahan terhadap kekerasan seksual. Salah satunya melalui pendidikan seks.

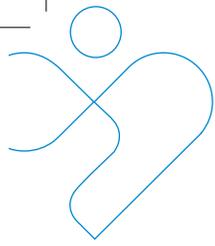
Kekerasan maupun pelecehan seksual pada anak dapat terjadi dimanapun, oleh siapapun baik itu teman, keluarga bahkan guru sekalipun. Kerap kali anak tidak menyadari tindakan-tindakan yang dilakukan itu termasuk pelecehan atau tidak.

Dalam siklus sosial, anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan. Posisi anak cenderung lemah, baik secara fisik maupun kemampuan melindungi diri. Akibatnya, mereka ditempatkan sebagai objek berbagai kekerasan.

Kegiatan yang menghadirkan narasumber dr. Wira Setyo Andini, MKM selaku Ketua Tim Kerja Kesehatan Reproduksi, dan Ketua Tim Kerja Pembinaan Pendidikan Kependudukan, Susanto, M.Pd, serta Tim Duta Generasi Berencana BKKBN Lampung, Nengah Suwirya

menggarisbawahi bahwa penyiapan generasi muda merupakan kerja bersama, baik keluarga, sekolah, maupun pemerintah.

Editor: Santjojo Rahardjo



Kegalauan Anggota Legislatif Termuda, 25 Titik Sosialisasi *Stunting* Dirambahnya



Anggota Komisi IX DPR-RI, Delia Pratiwi saat memberi sambutan.

■ Penulis : Meilinda Renata

BKKBN -- Delia Pratiwi Br. Sitepu, SH, lahir di Binjai (Sumatera Utara), 30 Maret 1988. Merupakan Anggota Komisi IX DPR-RI berasal dari fraksi Partai Golongan Karya. Ia terpilih sebagai anggota DPR-RI termuda berusia 26 tahun yang diusung Partai Golkar dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara III.

Ia juga tercatat sebagai calon legislatif perempuan dengan perolehan suara tertinggi dari Sumatera Utara. Sekaligus menempatkannya sebagai anggota DPR-RI dengan perolehan suara nomor 2 tertinggi, adalah sosok yang ramah dengan selalu turun ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Berangkat dari kekhawatiran Delia mengenai kondisi kesehatan dan sumber daya manusia menjadikannya bertekad duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya, menampung aspirasi masyarakat guna mensejahterakannya.

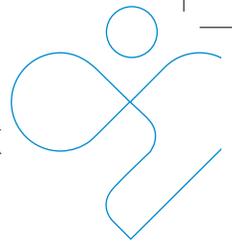
Komisi IX DPR-RI merupakan dewan perwakilan rakyat yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Sesuai tugas yang diembannya, Delia mengaku sangat mencemaskan kondisi saat ini, khususnya terkait *stunting*.

Stunting bukan hanya perihal pendek. Dalam Peraturan Presiden No.72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Kekurangan gizi dan infeksi berulang ini akan berdampak pada menurunnya fungsi kognitif pada anak dan infeksi penyakit kronik di kemudian hari.

Penurunan fungsi kognitif inilah yang menjadi keresahan bersama. Pasalnya, Indonesia tengah menghadapi situasi bonus demografi di mana jumlah penduduk Indonesia akan dimayoritasi oleh penduduk usia produktif. Bonus demografi ini harus dimanfaatkan



BKKBN Sumatera Utara bersama anggota Komisi IX DPR-RI, Delia Pratiwi dan pemerintah daerah setempat saat sosialisasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada masyarakat di Kabupaten Langkat.



dengan sebaik-baiknya dan disikapi dengan sebijak-bijaknya. Masa depan Bangsa Indonesia ada pada titik saat ini.

Saat ini, prevalensi *stunting* di Indonesia adalah 21,6 persen dan 21,1 persen untuk *level* provinsi Sumatera Utara. Bayangkan bagaimana jika angka *stunting* tidak menurun, saat puncak bonus demografi nanti.

Dengan kondisi seperti itu, tahun 2045 mayoritas penduduk Indonesia akan diisi penduduk usia produktif namun sulit berkinerja maksimal. Kondisi kecerdasan dan fungsi kognitif mayoritas penduduknya tidak dapat mengejar negara-negara lain. Indonesia menjadi negara tertinggal.

Untuk itu, BKKBN Sumatera Utara bersama anggota Komisi IX DPR-RI, Delia Pratiwi bertekad akan rutin memberikan sosialisasi mengenai program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada masyarakat di Kabupaten Langkat.

Sejauh ini sudah terlaksana tujuh titik dari 25 titik sosialisasi yang telah direncanakan ditambah oleh Delia Pratiwi. Sosialisasi ini merupakan salah satu program yang diusung untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai dua program tersebut. Melalui penyebaran informasi ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran mengenai bahaya *stunting* dan bagaimana upaya pencegahannya.

Selain itu, sosialisasi ini bertujuan untuk meluruskan isu-isu yang ada di masyarakat sehingga ketakutan masyarakat akan hal yang tidak mendasar tergantikan menjadi fakta terkini. Terutama yang berhubungan dengan alat dan obat kontrasepsi, vaksinasi, dan *stunting*.

Dalam masa jabatannya, Delia berjanji akan terus mengupayakan agar angka *stunting* dapat terus ditekan. Ia juga berjanji selaku anggota DPR untuk memfasilitasi kementerian-kementerian dan lembaga pemerintah lainnya melakukan kolaborasi lintas sektoral, seperti Kementerian Kesehatan, BKKBN, BPJS, dan lainnya, dalam mengupayakan penanganan *stunting*.

Menurut Delia, program Bangga Kencana bertujuan mengarahkan agar keluarga memiliki rencana berkeluarga yang nantinya diharapkan akan membentuk keluarga yang berkualitas.

Salah satunya dilakukannya pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga yang berfokus pada remaja dan calon pengantin, masa kehamilan dan masa pasca persalinan. Pendampingan dilakukan hingga anak berusia lima tahun.

Delia berharap pendampingan pada masa keemasan tersebut sebagai upaya agar segenap intervensi sensitif maupun spesifik yang diberikan dapat dipastikan sampai kepada penerima manfaat dan mampu berdampak nyata bagi penurunan angka prevalensi *stunting*. Jadi tidak salah sasaran.

Program percepatan penurunan *stunting* meru-



Pembagian bingkisan kepada peserta sosialisasi program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting*.

upakan program prioritas pemerintah dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yg berkualitas, merupakan pilar bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Suatu kondisi di mana SDM Indonesia memiliki kecerdasan tinggi, menjunjung tinggi pluralisme, berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika.

Khusus daerah Langkat, Delia ingin agar kasus *stunting* benar-benar diperhatikan dan dientaskan bersama dengan pemerintah daerah demi membangun kualitas SDM yang baik untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah di Sumatera Utara.

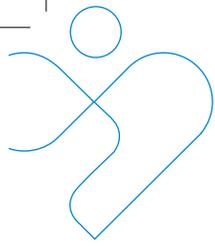
Masih banyak masyarakat yang belum terpapar informasi terkait *stunting* dan pembangunan keluarga berkualitas, khususnya di daerah Langkat sebagai Kabupaten dengan wilayah terluas di Sumatera Utara.

Hal ini yang menjadikan dasar Delia untuk berkontribusi dalam sosialisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan *Stunting* dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Kementerian Kesehatan (Gernas).

Diharapkan dengan sosialisasi ini masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Delia menggiatkan sosialisasi ini untuk dilaksanakan di banyak titik mengingat banyak masyarakat yang masih kekurangan informasi.

Komitmen Delia terhadap dua program besar nasional ini adalah mendorong penyebaran informasi dan pengawasan, termasuk mendorong kementerian dan lembaga untuk terus berkolaborasi bersama-sama dalam penanganan *stunting*. Ia juga menegaskan selalu memantau program percepatan penurunan *stunting* yang berjalan di Sumatera Utara.

Editor: Santjojo Rahardjo



ALIBATA, Inovasi Unggulan Bener Meriah dalam Percepatan Penurunan *Stunting*



Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti pada kegiatan Pendampingan dan Orientasi Pengelola Program PENTAS BKB HI Unggulan yang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah.



Plt. Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, Haili Yoga, saat memaparkan dan mengenalkan program ALIBATA.

■ Penulis: Tim Media Center BKKBN Aceh

ACEH, BKKBN - Pelaksana Tugas Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, Haili Yoga, memaparkan dan mengenalkan ALIBATA (Anak Lahir Bidan Beri Akta, Kartu Kesehatan, dan KIA), sebagai inovasi unggulan percepatan penurunan *stunting* di daerah penghasil kopi Arabika terbaik di Aceh.

Inovasi unggulan itu diangkat Haili Yoga pada kegiatan Pendampingan dan Orientasi Pengelola Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (PENTAS BKB HI Unggulan) yang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah, Kamis, (31/8/2023) lalu.

Kegiatan yang dibuka secara virtual oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, Nopian Andusti, dihadiri secara virtual di Jakarta oleh Asisten Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya; Kepala Desa Buniseuri, Rusmana; Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Irma Ardiana; dan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Husni Thamrin.

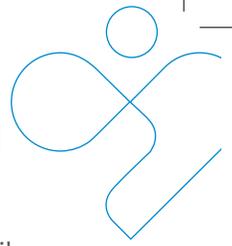
Di Aula Pemkab Bener Meriah, hadir Forkapimda, Sekretaris Daerah Kabupaten, Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera/Pembangunan Keluarga BKKBN Perwakilan BKKBN Aceh, Faridah; Kepala OPD KB, Reje, Kepala Desa Rembele, Suhailu, dan Penyuluh/Kader KB, Bidan, dan PKK.

“Kita memiliki beragam inovasi yang telah kita lahirkan yang sangat berkaitan dengan layanan-layanan dalam Program Bina Keluarga Balita atau BKB, yaitu program ALIBATA, program kerjasama dengan BPJS dan Dinas Kependudukan. Begitu anak lahir telah kita berikan Akte Kelahiran dan Kartu BPJS,” kata Haili Yoga.

Artinya, kata Pj. Bupati Bener Meriah itu, kesehatan anak sudah ditanggung oleh pemerintah. “Nah, ini yang kami lakukan dan hari ini sudah mencapai 99 persen. Di Bener Meriah anak yang lahir itu langsung mendapatkan kartu BPJS dan identitas anak, akte kelahiran dan kartu anak. Ini semua sudah dilakukan di 10 kecamatan dan 232 desa,” katanya lagi.

Menurut Haili Yoga, karya inilah yang sampai saat ini sudah memberikan pengaruh sangat berarti, khususnya bagi kaum perempuan dan anak. Juga telah memberikan kontribusi yang begitu besar terhadap program percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Bener Meriah.

Selain ALIBATA, keterlibatan orang tua dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), kata Pj. Bupati Bener Meriah, sangat penting dilaksanakan. Para kader BKB juga bertugas untuk memberikan pengetahuan dan



keterampilan kepada orang tua, agar mampu menerapkan kelas pengasuhan diri rumah untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia 0-23 bulan.

“Himbauan ini sudah kami sampaikan dalam setiap kesempatan kepada seluruh masyarakat Bener Meriah. Terutama kepada Calon Pengantin. Sehingga masyarakat paham tentang pentingnya kualitas tumbuh kembang anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” ujar mantan Sekda Kabupaten Bener Meriah.

Terkait, Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan (BKB HIU), ia mengatakan, bahwa BKB HIU adalah wujud nyata implementasi dari penyelenggaraan kelas pengasuhan orangtua. Program ini dapat mendukung percepatan penurunan *stunting* melalui penyediaan data, seperti ibu hamil, keluarga dengan anak usia 0-23 bulan, dan lainnya. Data yang dihasilkan terintegrasi antar pihak-pihak terkait.

Sebagai dasar hukum atau regulasi terkait kelompok BKB yang ada di Bener Meriah, jelas dia, pemerintah daerah juga sudah mengeluarkan Peraturan Bupati. Peraturan ini memuat kebijakan tentang anggaran untuk Kader Bina Keluarga Balita ke dalam anggaran desa.

“Artinya, Pemkab Bener Meriah sangat serius memerangi kasus *stunting*. Apalagi dengan komitmen dan dukungan dari seluruh unsur Forkopimda untuk ikut terlibat sebagai Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS),” jelasnya lagi.

Reje Kampung Rembele, Suhailu memberikan beberapa praktik baik yang dilakukan oleh BKB Mutik Cempaka. Selain melakukan enam pelayanan, BKB ini telah membuat perencanaan program yang dilakukan awal tahun. Kemudian dilaksanakan setiap bulan sesuai jadwal. Dievaluasi setiap tiga bulan sekali.

Kampungnya, kata Reje Rembele, juga menerapkan inovasi ALIBATA dan RGG (Rumoh Gizi Gampong) selama 90 hari. Pendampingan RGG selama 90 hari itu diwujudkan dalam bentuk melakukan konsultasi gizi didampingi Tim Pendamping Gizi Puskesmas, Kelas Memasak yang disesuaikan dengan usia anak, Penyiapan makanan satu kali sehari dengan besaran biaya Rp 18.000, dan pengantaran makanan ke anak *stunting*.

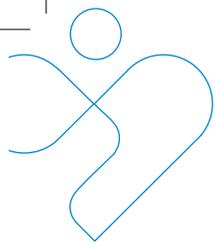
“Kader kami akan mendampingi keluarga untuk memberikan makanan ke anak. *Alhamdulillah*, program ini memberi dampak. Tahun 2022 kita ada 13 anak *stunting*. Kini, di 2023, tinggal enam anak *stunting*. Di antara enam itu, satu sudah memasuki fase balita,” tutupnya.

Adapun enam layanan BKB HI Unggulan adalah administrasi kependudukan dan pemilikan jaminan kesehatan; Pengasuhan/*parenting* bersama; Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak; Pembentukan karakter; Promotif, preventif, pemeliharaan kesehatan; Rujukan/Konseling/Perawatan/Bansos.

Editor: Santjojo Rahardjo



Peserta kegiatan Pendampingan dan Orientasi Pengelola Program PENTAS BKB HI Unggulan yang dilaksanakan di Kabupaten Bener Meriah.



Stunting Terendah di Indonesia

Gubernur Koster dan Ny Putri Koster Raih Penghargaan MKK

■ Penulis : Nur Octavia Dian R

DENPASAR, BKKBN – Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny Putri Koster, memperoleh penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK) yang disematkan Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ari Dwikora.

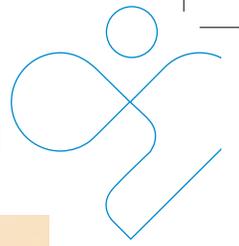
Bertempat di Jaya Sabha Rumah Jabatan Gubernur Bali pada Jumat (25/8/2023), penghargaan MKK ini diberikan atas prestasi dan komitmen Wayan Koster beserta Ny Putri Koster dalam menggerakkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta Percepatan Penurunan *Stunting*. Sehingga terwujud keluarga berkualitas bahagia dan sejahtera di Provinsi Bali.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama semua jajaran, Dinas Kesehatan serta tim penggerak PKK Provinsi Bali yang dipimpin Ny. Putri Koster bersinergi dengan tim Penggerak PKK Kabupaten/ Kota se-Bali dan Desa. Sehingga angka *stunting* di Bali turun dengan cepat,” ucap Wayan Koster.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi *stunting* di Provinsi Bali mengalami penurunan 2,9 persen dari yang sebelumnya 10,9 persen menjadi 8 persen atau jauh di bawah angka *stunting* nasional.



Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny Putri Koster, memperoleh penghargaan Manggala Karya Kencana (MKK).



Inspektur Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ari Dwikora menerima cinderamata dari Gubernur Bali, Wayan Koster.

“Pada tahun ini, saya targetkan angka *stunting* di Bali semakin turun dengan target mencapai 6 persen dan ke depan kita tentunya ingin angka *stunting* berhasil mendekati zero atau nol persen,” harapnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny Putri Koster menyampaikan TP PKK Provinsi Bali yang dipimpinnya terus berupaya menyebarkan edukasi dalam bentuk sosialisasi pencegahan *stunting* kepada masyarakat luas.

“Kami terus berupaya memberikan sosialisasi, dan bantuan untuk meningkatkan gizi serta mengajak orang tua dan calon orang tua untuk memperhatikan asupan nutrisi bagi anak melalui kegiatan Menyapa dan Berbagi ke seluruh kabupaten/kota di Bali. Ini dilakukan bekerjasama dengan TP PKK Kabupaten/Kota se-Bali dan dinas serta lembaga di Provinsi Bali,” ucap Ny Putri Koster.

Menyerahkan penghargaan MKK, Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora menyampaikan rasa bangganya terhadap Bali yang dipimpin Gubernur Bali bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali yang telah luar biasa membawa Bali sebagai provinsi dengan angka *stunting* terendah di Indonesia.

“Namun, kami berharap agar Bali jangan sampai terlena dengan pencapaian penurunan *stunting* paling terendah. Kami berharap kolaborasi kerja yang sangat baik dari Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster terus berlanjut untuk mengajak seluruh pemerintah daerah di Kabupaten/Kota berkomitmen mempercepat penurunan *stunting*,” harapnya.

Profil Gubernur Bali

Putra daerah asal Kabupaten Buleleng, Wayan Koster didampingi Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati telah memimpin Provinsi Bali sejak tahun 2018. Kebijakan-kebijakan Wayan Koster yang sering digaungkan merupakan penguatan budaya Bali.

Hal ini juga tertuang dalam visi dan misi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

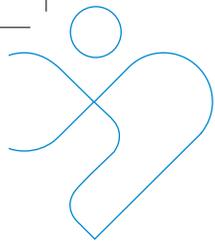
Tujuannya, mewujudkan kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia, ‘sekala-niskala’ menuju kehidupan dan ‘gumu’ Bali sesuai prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik, berkari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan itu digapai melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Komitmen Wayan Koster membawa Bali menuju zero *stunting* melalui visi misi, dilakukan dengan memperkuat lintas sektor. Juga dengan memperbaiki sanitasi lingkungan melalui Pembatasan Timbulan Plastik Sekali Pakai dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Semua itu untuk mewujudkan lingkungan Bali bersih. Karena lingkungan bersih akan memberi pengaruh terhadap ekosistem kesehatan manusia.

Editor: Santjojo Rahardjo



Perkawinan Anak Tinggi, Ancaman Kehamilan Usia Dini dan Risiko *Stunting*

■ Penulis : Padly Hadis Said/Martin

MAMUJU, BKKBN - Dampak perkawinan anak menjadi salah satu isu serius yang menjadi topik pembicaraan di Provinsi Sulawesi Barat. Perkawinan anak sering kali mengakibatkan kehamilan pada usia yang sangat muda, meningkatkan risiko *stunting* pada anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang masih remaja.

Data terbaru yang dirilis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulawesi Barat mencatat bahwa tren perkawinan anak di wilayah ini masih tinggi, melebihi angka rata-rata nasional sebesar 11,7 persen. Data ini mencakup periode hingga Mei 2023, dengan fokus pada kelompok usia 15-19 tahun.

Kasus perkawinan anak di Sulawesi Barat pada rentang usia 15-19 tahun mencapai angka sebanyak 1.347 kasus, sebuah statistik yang mencerminkan tantangan serius dalam upaya mengatasi perkawinan anak dan mencegah *stunting* di Provinsi Sulawesi Barat.

Keseriusan situasi ini menjadi sorotan dalam acara Promosi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) Percepatan Penurunan *Stunting* Bersama Masyarakat di Tingkat Kabupaten, Minggu (20/8/2023), di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Acara tersebut dihadiri anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal.

Dalam kesempatan tersebut, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal menegaskan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang risiko perkawinan anak. Ia juga menggarisbawahi perlunya penurunan angka *stunting*, karena perkawinan anak dapat berkontribusi pada masalah *stunting*.

“Kegiatan promosi dan KIE ini merupakan langkah yang sangat baik untuk menyebarkan informasi serta melakukan edukasi kepada masyarakat tentang risiko perkawinan anak dan *stunting*,” kata Ruskati.

Lebih lanjut, Anggota Komisi IX DPR RI dapil Sulawesi Barat ini menunjukkan pentingnya kerjasama antara

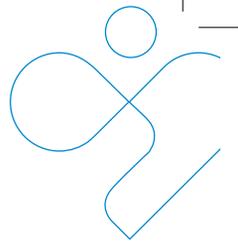


BKKBN bersama Komisi IX DPR RI bekerjasama dalam kegiatan promosi dan KIE Percepatan Penurunan *Stunting* bersama masyarakat Desa Kenje, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar yang dihadiri anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal.

BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) dan Komisi IX DPR RI dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan keluarga berencana, perkawinan anak, dan *stunting*.

“Anjuran dari BKKBN untuk menikah bagi pria 25 tahun dan perempuan 21 tahun dimaksudkan untuk memastikan bahwa calon suami dan istri sudah memiliki kematangan fisik dan mental yang cukup sebelum memutuskan untuk menikah,” lanjutnya.

Kepala Desa Kenje, Alimuddin, juga menunjukkan komitmen positif dalam mendukung upaya penurunan angka *stunting*. Ia berjanji bahwa setelah semua



infrastruktur di Desa Kenje mencapai target, fokus akan beralih pada pemberdayaan masyarakat dalam penanganan *stunting*.

“Semoga niat baik, dan semua yang kita rencanakan bersama bisa tercapai dengan baik,” tegas Alimuddin.

Menurut data dari Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, Kabupaten Polewali Mandar mengalami kenaikan angka *stunting* sebesar 3,3 persen. Angka prevalensi *stunting* di Kabupaten ini meningkat dari 36 persen pada tahun 2021 menjadi 39,3 persen tahun 2022.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Sulbar, Rezky Murwanto, yakin bahwa Kabupaten Polewali Mandar memiliki kemampuan untuk menurunkan angka *stunting* pada tahun 2024. Penurunan angka *stunting* diharapkan

akan melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas di masa yang akan datang.

“Penting untuk diingat bahwa tidak semua anak yang pendek mengalami *stunting*. *Stunting* sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu *stunting*. Upaya untuk memastikan anak-anak menerima makanan bergizi sangat penting untuk mencegah *stunting*,” kata Rezky.

Dalam kegiatan ini, 350 peserta dari berbagai lapisan masyarakat berkomitmen untuk bersama-sama memerangi *stunting*, sehingga anak-anak di Desa Kenje dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta memiliki masa depan yang cerah.

Editor: Santjojo Rahardjo

TEKA-TEKI SILANG

TTS No.2/IX/23

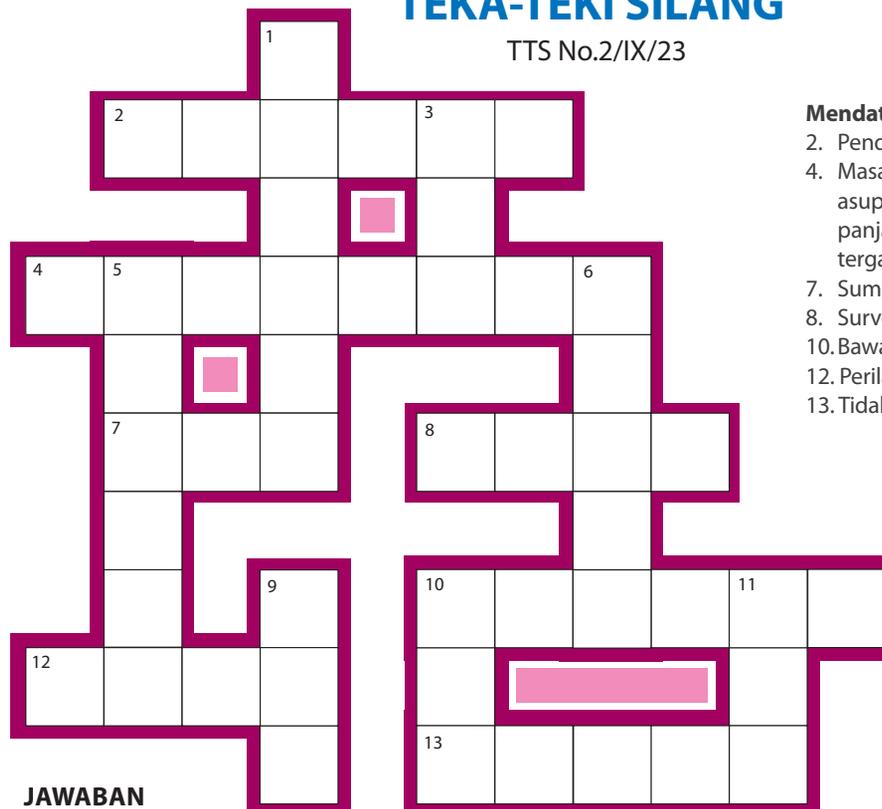
PERTANYAAN

Mendatar

2. Pendek
4. Masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak
7. Sumber Daya Manusia (dibalik)
8. Survei Status Gizi Indonesia
10. Bawah lima tahun
12. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
13. Tidak cantik/tampan

Menurun

1. Akibat kurang asupan gizi dalam jangka waktu panjang dan berulang hingga mengganggu pertumbuhan
3. Ikatan Dokter Indonesia
5. Hidup, berkembang
6. Tidak sesuai harapan
9. Air Susu Ibu
10. Bina Keluarga Balita
11. Tim Pendamping Keluarga



JAWABAN

TTS NO.1/VII/23

Mendatar:

1. ASUPAN, 5. AKUT, 7. NASI, 8. RAN, 9. SSGI, 11. BAAS, 12. GAGAL

Menurun:

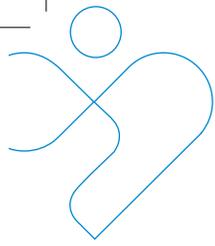
2. STUNTING, 3. PENDEK, 4. NASIONAL, 6. KURUS, 10. ASI

PEMENANG TTS NO.1/VII/23

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Gerai Si Uni | 4. Yulia Slmt |
| 2. Estetika Lombu | 5. Raymond Nadeak |
| 3. Mayank bkkbn | |



Menangkan voucher pulsa senilai Rp 100.000 untuk 5 pemenang. Jawab pertanyaan pada kolom TTS dengan benar dan kirimkan jawabannya melalui mediacenter@bkkbn.go.id. Pemenang akan diundi dan diumumkan di Sahabat Keluarga edisi berikutnya.



Kerja Kolaboratif OPD

Bupati Pinrang Berharap Prevalensi *Stunting* 15% di 2023



Bupati Pinrang, HA. Irwan Hamid, saat menerima kunjungan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, M. Rizal Martua Damanik didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin di Kantor Bupati Pinrang.

■ Penulis: Indra Gumbira Rukmana

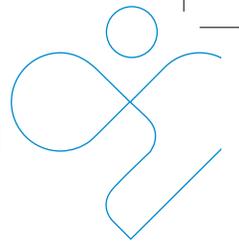
MAKASSAR, BKKBN - Bupati Pinrang, HA. Irwan Hamid, S.Sos, menyampaikan bahwa daerahnya telah berhasil menurunkan prevalensi *stunting* dan berharap tahun ini dapat turun di angka 15 persen.

Hal itu dikemukakan Bupati saat menerima kunjungan Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shodiqin, SH, MM, di Kantor Bupati Pinrang (Sulawesi Selatan), Selasa (22/08/2023).

Tahun 2022, prevalensi *stunting* di Kabupaten Pinrang

turun sebesar 3,6 persen dari capaian tahun 2021, dari 24,5 persen menjadi 20,9 persen (SSGI 2022). Hasil ini, menurut Bupati, merupakan kerja kolaboratif yang baik dari semua lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menurunkan *stunting*. “Harapan kami di tahun 2023 ini prevalensi *stunting* Kabupaten Pinrang dapat mencapai 15 persen,” ujar Irwan Hamid.

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang, dr. H. Ramli Yunus, M.Kes, Bupati



Irwan juga menyinggung soal Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Bupati meminta kebijakan tentang P3K asal Kabupaten Pinrang yang sudah diterima agar tetap ditempatkan di Kabupaten Pinrang tanpa harus ditempatkan di luar Provinsi Sulawesi Selatan.

“Kami meminta kebijakan dari BKKBN Pusat, untuk tenaga P3K yang asli Kabupaten Pinrang untuk bisa ditempatkan sebagaimana wilayahnya. Hal ini karena ada beberapa yang tinggal dua tahun pensiun harus ditempatkan di luar Sulsel. Padahal di kabupaten kami (Pinrang) masih membutuhkan tenaga mereka,” pungkasnya.

Deputi Lalitbang BKKBN, Prof. Rizal Damanik, mengapresiasi strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menurunkan prevalensi *stunting*. Ia berharap pemerintah kabupaten tetap menjaga soliditas kolaboratif di lingkungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Pinrang dalam menurunkan *stunting* menuju target nasional 14 persen.

Terkait penempatan P3K di lingkungan BKKBN, Prof. Damanik mengatakan penempatan P3K di lingkungan BKKBN sudah ditetapkan. “Melihat kondisi real di lapangan memang diperlukan perjanjian ulang untuk penempatan, dan hal ini pun sudah dibahas dalam rapim BKKBN Pusat serta akan dibicarakan dengan Menpan-RB,” ujar Prof. Damanik.

Adapun P3K asal Kabupaten Pinrang yang mengusulkan



Bupati Pinrang, HA. Irwan Hamid.

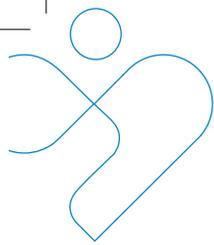
pengunduran diri, Prof. Damanik menyarankan agar dipertimbangkan kembali. Palsanya, hal ini akan berkaitan dengan kuota P3K tahun berikutnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu Asisten Ahli 1 Pemkab Pinrang, Ketua Tim kerja Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Perwakilan BKKBN Sulawesi Selatan, Koordinator Manager Satgas *Stunting* Provinsi Sulawesi Selatan dan Ketua IPeKB Kabupaten Pinrang.

Editor: Santjojo Rahardjo



Bupati Pinrang, HA. Irwan Hamid, memberi salam bersama Deputi Lalitbang, M. Rizal Martua Damanik, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Shidiqin di Kantor Bupati Pinrang dan Kepala Dinas P2KBP3A, dr. H. Ramli Yunus, M.Kes.



dr Hasto Menjawab

• Kesehatan Reproduksi

Umur 24 tahun apakah boleh disteril

Pertanyaan:

Halo Dokter Hasto. Saya mau tanya. Dok, saya perempuan berumur 24 tahun dan sudah memiliki dua anak dan tidak ingin tambah anak lagi. Kalau saya mau steril, apakah boleh, atau harus menunggu ada indikasi khusus terlebih dahulu. Mohon penjelasannya Dok?

Sonia (Sumber: TikTok BKKBN)



Jawab:

Ini keren. Umur 24 tahun, sudah punya anak dua dan tidak mau punya anak lagi. Saya puji, itu bagus. Anak dua yang penting sehat, cerdas dan ceria. Itu saya sangat setuju.

Saya anjurkan, untuk pilihan kontrasepsinya lebih bijaksana. Anda bisa pilih susuk (implan) atau IUD yang sifatnya *long term*, jangka panjang. Jadi tidak bolak-balik lepas-pasang kontrasepsi. Namanya MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Bisa menggunakan susuk/implan atau, IUD atau spiral yang bisa berfungsi selama tiga tahun. Setelah tiga tahun bisa diperpanjang lagi.



Kenapa saya menyarankan MKJP, karena kita tidak tahu tentang kondisi anak-anak ibu yang masih kecil. Saya berharap anak-anak ibu sehat terus. Tapi di negara kita masih banyak penyakit infeksi, demam berdarah, TBC dan lainnya, sehingga kesehatan mereka perlu dijaga. Kita perlu memastikan mereka tumbuh besar dan sehat sebelum memutuskan untuk steril.

Jika memang sudah yakin dengan kondisi anak-anak dan ingin disterilkan, maka saran saya gunakan metode kontrasepsi tubektomi. Dan kalau bisa saat mau disterilkan, umur ibu di atas 30 tahun. Jadi itu saran saya.

Terima kasih semangatnya untuk dua anak lebih sehat. Luar biasa! ■

Redaksi menerima pertanyaan pembaca melalui email mediacenter@bkkbn.go.id atau melalui *Call Center* 0812 3888 8840, Media Center BKKBN



Merdekakan Anak Indonesia Dari *Stunting*

PERATURAN Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan bukti komitmen Pemerintah dalam menangani permasalahan *stunting*. Hal ini kemudian menyadarkan masyarakat luas bahwa sesungguhnya salah satu penghalang besar dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berada pada masalah *stunting*. Karenanya, terbitlah peraturan itu guna memperkuat kelembagaan dan kerangka intervensi yang harus dilakukan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*.

Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 diantaranya menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*. Selanjutnya, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* juga dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa/kelurahan.

Stunting sendiri merupakan kondisi gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak menjadi lebih pendek dari standar usianya. Akibat kondisi kekurangan gizi menahun dan infeksi berulang sehingga perkembangan otak dan tumbuh kembang anak terhambat. *Stunting* dapat memengaruhi kualitas SDM sebuah negara. Bukan hanya berdampak pada kondisi fisik, melainkan juga kesehatan hingga kemampuan berpikir anak.

Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* pada posisi 14 persen di tahun 2024. Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi *stunting* di Indonesia 27,67 persen dan turun menjadi 21,6 persen menurut SSGI 2022.

Dalam program Percepatan Penurunan *Stunting* terdapat Lima Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Berdasarkan lima pilar ini telah disusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* Indonesia (RAN PASTI) 2021 – 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021. Rencana aksi ini untuk mendorong dan menguatkan konvergensi antar program.

Apa yang pernah ditegaskan Presiden Joko Widodo tentang target *stunting* tidak sulit dicapai itu sesungguhnya berlatar belakang, bahwa mengatasi permasalahan *stunting* bukanlah hal yang mudah tapi dapat kita selesaikan dengan berkolaborasi dan gotong-royong.

BKKBN sendiri telah mengembangkan program inovasi/terobosan. Pertama, program Dapur Sehat Atasi *Stunting* (DASHAT) yang diterapkan di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Program ini bertujuan memberikan pemahaman serta pembelajaran kepada masyarakat tentang menu masak dengan gizi seimbang untuk balita dan ibu hamil.

Kedua, melalui upaya pencegahan dari hilir ke hulu dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berjumlah 200.000 tim atau 600.000 petugas pendamping. Tim terdiri atas bidan, kader PKK, dan kader KB di tingkat desa. Tim berkolaborasi dengan banyak pihak dalam mendampingi keluarga berisiko *stunting*.

Ketiga, pendampingan bagi calon pengantin. Dalam program ini, BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Agama untuk melakukan *screening* tiga bulan sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan. Calon pengantin harus memiliki hemoglobin (HB) minimal 11,5, lingkar lengan atas minimal 23,5 cm serta harus siap nikah dan siap hamil yang disiapkan melalui aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil (Elsimil).

Calon pengantin perempuan yang dinyatakan memiliki anemia dari hasil pemeriksaan kesehatan, akan diberikan tablet tambah darah yang dapat dikonsumsi calon pengantin selama 90 hari dan dihibau untuk menunda kehamilannya. Sementara bagi calon pengantin perempuan yang terdeteksi mengalami kurang gizi, nantinya akan diberikan edukasi mengenai cara untuk meningkatkan indeks massa tubuh. Sehingga calon pengantin dapat memenuhi syarat untuk hamil dan tidak melahirkan bayi yang berisiko *stunting*.

Keempat, fokus pada ibu hamil. Pencegahan *stunting* paling efektif dilakukan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), dengan memastikan kehamilan ibu sehat. Ibu hamil akan diberi pendampingan terkait konsumsi makanan bergizi, karena 70 persen pertumbuhan otak bayi terjadi saat kondisi ibu hamil. Kelima, fokus pada balita pasca melahirkan dengan melihat anak tersebut lahir dengan panjang tubuh tidak kurang dari 48 cm dan bobot di bawah 2,5 kg. Jika kurang maka bayi tersebut berisiko tinggi mengalami *stunting*.

Keenam, program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS). BKKBN menggerakkan secara masif program ini karena masih ada 13,5 juta (atau 21,6 persen) keluarga berisiko *stunting*. Mulai dari pejabat tertinggi seperti Menteri dan Panglima TNI/Kapolri, masyarakat umum hingga 1.000 pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ramai-ramai menjadi Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting*, di mana program pembagian telur kepada keluarga berisiko *stunting* dimasifkan.

Apa yang dilakukan pemerintah itu tiada lain untuk merealisasikan Visi Indonesia Emas 2045. Karenanya, upaya percepatan penurunan *stunting* harus mendapatkan dukungan semua pihak terutama keluarga. Keluarga menjadi penentu utama dalam upaya pencegahan terjadinya *stunting*. Jika sumber daya manusia Indonesia lemah akibat *stunting*, maka harapan kita mewujudkan Indonesia maju akan sulit untuk tercapai.

Oleh karenanya kita harus semakin giat dalam memasifkan program-program Pencegahan Penurunan *Stunting* melalui berbagai saluran yang ada. Seperti meningkatkan ketersediaan akses pangan lokal di berbagai daerah, meningkatkan konvergensi, meluaskan kesertaan banyak pihak dalam program BAAS hingga mengajak pasangan usia subur ber-KB dan mengingatkan keluarga pentingnya mengatur jarak kelahiran (*spacing*) antar anak minimal tiga tahun.

Dengan semangat berkolaborasi, mari cegah *stunting* untuk mewujudkan anak Indonesia merdeka dari *stunting*! ■

Karena Anak Adalah Pembawa Harapan

Cegah Stunting

Sejak Dalam Kandungan



Stunting adalah gangguan gizi kronis yang mengakibatkan bayi gagal tumbuh, badan pendek, kecerdasan rendah dan mudah sakit-sakitan. Stunting dapat dicegah dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan. Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi Pendamping Keluarga terdekat.



Sahabat Keluarga
Edisi September 2023